

**KONFLIK ALIH FUNGSI TANAH PADA MASYARAKAT  
(STUDI KASUS PEMBANGUNAN PELABUHAN PALIPI  
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH:**

**MUH MAWARDI  
10538 02124 11**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2015**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin Tlp : (0411) 860132 Makassar 90221**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Muh Mawardi  
NIM : 10538 2124 11  
Jurusan : Pendidikan Sosiologi  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Judul Skripsi : Konflik Alih Fungsi Tanah pada Masyarakat (Studi Kasus  
Pembangunan Pelabuhan Palipi Kecamatan Sendana Kabupaten  
Majene

Makassar, 2015

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Hj.Syahribulan.K,M.Pd

Dra.Hj.StFatimah Tola,M.Si

Mengetahui,

Dekan FKIP Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
PendidikanSosiologi

Dr. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum  
NBM. 858 625

Dr. H. Nursalam, M.Si  
NBM. 951 829



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin Tlp : (0411) 860132 Makassar 90221**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Muh Mawardi

NIM : 10538 2124 11

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi : Konflik Alih Fungsi Tanah pada Masyarakat (Studi Kasus  
Pembangunan Pelabuhan Palipi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

Setelah di periksa dan diteliti, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diujikan.

Makassar, 2015

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Hj.Syahribulan.K,M.Pd

Dra.Hj.StFatimah Tola,M.Si

Mengetahui,

Dekan FKIP Unismuh Makassar

Ketua Jurusan

PendidikanSosiologi

Dr. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum  
NBM. 858 625

Dr.H. Nursalam, M.Si  
NBM. 951 829



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin Tlp : (0411) 860132 Makassar 90221**

---

---

**SURAT PERJANJIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Mawardi  
NIM : 10538 2124 11  
Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dari awal penyusunan proposal sampai selesai skripsi ini, saya yang membuat dan menyusun sendiri skripsi ini (tidak dibuatkan atau penjiplakan dari siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi ini, saya melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas Muhammadiyah Makassar.
3. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir di atas maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 2015

Yang membuat perjanjian

MUH MAWARDI  
NIM. 10538 2124 11

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Pendidikan Sosiologi

Dr.H. Nursalam,M.Si  
NBM. 951 829



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin Tlp : (0411) 860132 Makassar 90221**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Mawardi

NIM : 10538 2124 11

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : Konflik Alih Fungsi Tanah pada Masyarakat (Studi Kasus  
Pembangunan Pelabuhan Palipi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri,  
bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya bersedia  
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 2015

Yang membuat pernyataan

Muh Mawardi  
NIM. 10538 2124 11

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Hj.Syahribulan.K,M.Pd

Dra.Hj.StFatimah Tola,M.Si



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 [www.fkip-unismuh-info](http://www.fkip-unismuh-info)

**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muh.Mawardi  
Stambuk : 10538 2124 11  
Jurusan : Pendidikan Sosiologi  
Pembimbing : **Dra.Hj.Syahribulan.K,M.Pd**  
Judul Skripsi : Konflik Alih Fungsi Tanah Pada Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Pelabuhan Palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene)

**Konsultasi Pembimbing I**

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan

Catatan:

*Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi ke dosen pembimbing minimal 3 kali*

Mengetahui,  
Ketua Jurusan pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si.  
NBM. 951 829



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 [www.fkip-unismuh-info](http://www.fkip-unismuh-info)

**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muh.Mawardi  
Stambuk : 10538 2124 11  
Jurusan : Pendidikan Sosiologi  
Pembimbing : Dra.Hj.St Fatimah Tola,M.Si  
Djudul Skripsi : Konflik Alih Fungsi Tanah Pada Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Pelabuhan Palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene).

**Konsultasi Pembimbing II**

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan

Catatan:

*Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi ke dosen pembimbing minimal 3 kali*

Mengetahui,  
Ketua Jurusan pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si.  
NBM. 951 829

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Gapailah angan dan cita-citamu setinggi langit.  
Tapi jangan lupa kakimu harus tetap berpijak di bumi.  
Hadapilah hidup dengan senyuman yang indah.  
Akan tetapi selalulah bersyukur kepada tuhan.*

*(muh mawardi)*

*Kupersembahkan karya tulis sederhana ini spesial  
kuperuntukkan kepada kedua orang tuaku tercinta,  
yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang  
dan limpahan cintanya.*

*Terima kasih Ayah. . . . .*

*Terima kasih bunda. . . . .*

*Peluk cium dari anakmu. . . . .*

## ABSTRAK

**MUH MAWARDI, 2015.** “Konflik Alih Fungsi Tanah pada Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Pelabuhan Palipi Kecamatan Sendana Kabupaten Majen)” Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Hj.Syahribulan. dan pembimbing II Hj.St Fatimah Tola

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian sosial budaya yang Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *Wawancara langsung* dengan memilih beberapa informan yang memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. yakni orang asli Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dan mengetahui penyebab konflik di masyarakat dalam pembangunan pelabuhan palipi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Konflik alih fungsi tanah pada masyarakat dan penyebab dari konflik* itu sendiri dan mengetahui cara mengatasi konflik itu sendiri. Karena konflik dapat menyebabkan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya konflik yang terjadi di masyarakat dalam pembangunan ini salah satu penyebabnya adalah adanya ketiidak sesuaian harapan masyarakat terkhusus dalam hal alih fungsi lahan mulai dari penolakan untuk di relokasi, ganti rugi yang tidak sebanding dan adanya kinerja pembangunan yang tidak terlalu bagus dari pemerintah karena masyarakat juga perlu melihat keseriusan dari pemerintah. Hal ini dapat kita jumpai khususnya di Desa Sendana yang dimana masyarakatnya menjadi tidak nyaman atau dengan kata lain masih kurang menerima adanya pembangunan pelabuhan Palipi ini. Dan peran serta masyarakat dan pemerintahlah yang dapat menyelesaikan masalah ini karena ini merupakan kebutuhan bersama dan memiliki tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan daerah itu sendiri

**Kata Kunci: Konflik, Alih fungsi lahan**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayang yang memberikan kesehatan sehingga apa yang penulis kerjakan dengan penuh kesungguhan ini dapat terselesaikan sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan tak lupa pula penulis kirimkan salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah memberikan umat manusia jalan kehidupan yang lebih terang dari pada alam yang penuh dengan kegelapan yakni Jahiliyah.

Kesungguhan, dan ketekunan merupakan kunci dari penulisan skripsi yang berjudul *“Konflik Alih Fungsi Tanah pada Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Pelabuhan Palipi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene”*. Apa yang penulis telah hasilkan ini sungguh hanyalah sebuah karya yang belum dapat dikatakan sebagai suatu karya yang sempurna sebagaimana layaknya apa yang dicita-citakan oleh banyak Mahasiswa. Namun, dibalik itu yang terpenting bagi penulis, agar kiranya karya yang amat sederhana ini dapat berguna terkhusus buat penulis dan tentunya buat para akademisi dan masyarakat umum. Penulis patut berbangga karena apa yang telah dihasilkan melalui skripsi ini adalah hasil dari usaha penulis sendiri disertai bantuan dari beberapa pihak yang telah memberikan kontribusinya sehingga apa yang diinginkan oleh penulis dapat dituangkan kedalam tulisan ini. Oleh karena itu, penulis dengan sangat berterima kasih atas pihak-pihak dibawah ini yang telah turut serta dalam membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, kepada ayahanda *ALUDDIN ZAINUDDIN* dan ibunda tercinta *NURHAEDAH* yang telah melahirkan dan membesarkan saya hingga mampu memberikan jalan kepada saya untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang hingga pada akhirnya berada pada tahap akhir dalam studi untuk meraih gelar sarjana seperti sekarang ini. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan demi kesuksesan anak-anaknya yang rela berkorban untuk memberikan pendidikan setinggi-tingginya ditengah berbagai cobaan dan rintangan dalam keluarga. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada:

Dr. H. Irwan Akib, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Nursalam, M.Si dan Muhammad Akhir, S.Pd., M.Pd, Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dra.Hj.Syahribulan.K,M.Pd selaku pembimbing I dan Dra.St.Fatimah Tola,M.Si selaku pembimbing II karena bimbingan dan arahan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah mendidik dan membimbing selama penulis mengikuti proses perkuliahan.

Kepada pihak-pihak pemerintahan daerah yang telah memberikan izin penelitian sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Bapak Bupati Majene, Kepala Kesbang Majene, Bapak Camat Sendana, dan Kepala Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene yang dengan senang hati memberikan izin penelitian kepada penulis. Dan terima kasih banyak kepada masyarakat Desa Sendana atas bantuan dan kesediaannya membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.

Tak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih buat kawan-kawan seperjuangan saya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah lama tak bercanda bersama, karena kesibukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Buat Kakakku, Selfiana, Erwin, Irwan, St.Alfiah dan adikku Ais dan Upi serta tak lupa kepada para sahabat terbaikku yang setia menemaniku di Makassar ishak,nasrul, killang,eci,dudi,tono, ikhsan, firman, darwin,wiji, sarah, emma dan anti. telah banyak membantu penulis dalam memberikan dukunga moril selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan acuan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis hanya dapat memohon doa agar kiranya pihak-pihak yang telah membantu penulis mendapatkan ridho dan balasan yang terindah dari Allah SWT. Dengan berbangga hati dan kerendahan diri penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan hanya kepada Allah SWT kita

memohon semoga berkat dan rahmat serta limpahan pahala yang berlipat ganda selalu dicurahkan kepada kita semua.

*Amin, Ya Rabbal Alamin!*

Makassar, Oktober 2015

Penulis,

Muh Mawardi



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERJANJIAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KARTU KONTROL PEMBIMBING I.....	vi
KARTU KONTROL PEMBIMBING II.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN .....	xix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah.....	4
C. TujuanPenelitian.....	5
D. ManfaatPenelitian.....	5

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Teori .....	7
1. Hakikat Masyarakat .....	7
2. Konflik.....	12
3. Alih fungsi lahan.....	23
4. Kekuasaan .....	26
5. Pembangunan.....	32
6. Pelabuhan.....	33
B. Kerangka Pikir.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Objek dan Subjek .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data .....	40
F. Validitas Data.....	41
G. Instrument Penelitian.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	47
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Penelitian.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Jumlah penduduk di Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.....	48
2.	Struktur organisasi di Desa Desa Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.....	49
3.	Tingkat pendidikan di Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene .....	50
4.	Jumlah penduduk berdasarkan tempat tinggal dusun Palipi Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene .....	51
5.	Jumlah penduduk berdasarkan tempat tinggal dusun Palipi Selatan Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.....	52
6.	Jumlah penduduk berdasarkan tempat tinggal dusun Palipi Utara Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.....	53
7.	Jumlah penduduk berdasarkan tempat tinggal dusun Ratte Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.....	53
8.	Profil informan.....	54
9.	Daftar informan.....	55

## DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 2.1 Skema Kerangka Pikir .....	35



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan pendukung mata pencaharian di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industry, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan yang mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bumi telah disebutkan bagiannya di sebutkan pada pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang – orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Lahan sebagai bagian atau unsur dari lingkungan alam adalah merupakan salah satu wadah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatannya. Sejalan dengan diungkapkan Bintarto (1977:10) lahan diartikan sebagai “suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dimana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupannya”. Lahan merupakan potensi fisik atau sumber daya alam

yang secara kuantitas tidak akan bertambah, sedangkan pertumbuhan penduduk senantiasa mengalami perkembangan cukup pesat dari waktu ke waktu. Hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan penduduk akan lahan yang tidak terbatas dengan jumlah lahan yang terbatas. Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya penduduk dan meningkatnya pembangunan, maka semakin meningkat pula kebutuhan penggunaan lahan

Menurut Arsyad (1989:207) penggunaan lahan (land use) diartikan sebagai “bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spirituil”. Sedangkan pengertian penggunaan lahan yang dikemukakan oleh Vink dalam Sitorus (1986:176) yaitu setiap bentuk campur tangan manusia terhadap sumber daya lahan baik yang sifatnya tetap atau permanen ataupun merupakan daur yang bertujuan memenuhi kebutuhan material maupun spiritual ataupun keduanya.

Menurut Arsyad (1989:2007) Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan bukan pertanian dapat berupa permukiman, industri, rekreasi, pertambangan dan lain-lain.

Banyaknya manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak bertambahnya jumlah tanah yang ada menjadi salah satu inti permasalahannya. Mau tidak mau untuk menjalankan pembangunan, diadakan proses pengadaan tanah yang asalnya dari tanah yang sudah dihaki oleh rakyat. Proses tersebut cukup memakan waktu yang lama, oleh karena salah satu pihak merasa adanya ketidak-adilan. Proses yang cukup lama ini, otomatis membuat jalannya pembangunan menjadi

tersendat. Maka itu dengan memperkenalkan pada masyarakat akan pentingnya fungsi sosial yang dipunyai oleh seluruh hak-hak atas tanah kiranya dapat membantu mengubah cara berpikir individual masyarakat. Dengan prinsip ini kepentingan pribadi atas tanah tidak dibiarkan merugikan kepentingan banyak orang (umum). Apalagi ditambah dengan peraturan baru yaitu PERPRES Nomor 36 Tahun 2005 dan PERPRES Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Begitu juga dengan pihak pemerintah, harus memperhatikan jumlah kerugian yang wajar, layak dan adil untuk pemegang tanah. Dengan begitu tujuan UUPA untuk mencari keseimbangan antara dua kepentingan rakyat (pembangunan) dan kepentingan individu dapat segera terwujud dengan baik.

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena tidak hanya mempunyai nilai ekonomis, namun juga menyangkut masalah sosial, sosial politik, budaya, psikologis, lingkungan hidup dan bahkan aspek-aspek hak manusia.

Berawal dari hal-hal tersebut maka dalam pengadaan tanah, hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati dan pendekatan yang terpadu dengan masyarakat melalui tatanan, aturan dan hukum yang ada, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan keresahan dalam masyarakat

Prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum haruslah dijadikan landasan sesuai dengan prinsip bahwa negara kita adalah negara hukum, sehingga harus diperhatikan asas-asas kesejahteraan sesuai apa yang menjadi tujuan negara kita untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur.

Pesoalan tanah jua menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia, maka tidaklah perlu terjadi adanya penyelesaian masalah pertanahan yang hanya ditekankan untuk kepentingan umum semata-mata dengan mengorbankan hak-hak asasi manusia.

Kasus-kasus pengalihan fungsi tanah seperti saat ini banyak terjadi di era modern seperti saat ini karena berbagai tuntutan dan salah satu yang memicu adanya pengalihan fungsi tanah adalah adanya proses pembangunan. Istilah pembangunan secara luas sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang “lebih baik”. Tidak hanya terjadi pada kota-kota besar saja tetapi pengalihan fungsi tanah juga terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia bahkan sampai ke pelosok desa. Pengalihan fungsi tanah pada dasarnya mempunyai alasan untuk membangun sebuah bangunan misalnya pembangunan industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan namun mengorbankan lahan masyarakat yang sudah dijadikan tempat tinggal, ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah benar-benar serius akan pembangunan di daerah. Sama halnya dalam kasus pembangunan pelabuhan palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene yang menimbulkan konflik karena tanah yang digunakan dalam proses pembangunan adalah tanah masyarakat sehingga menimbulkan respon negatif oleh masyarakat.

Pembangunan pelabuhan palipi ini banyak menemui kendala karena berbagai permasalahan mulai dari ketidaksetujuan masyarakat direlokasi, pengambilan

lahan pertanian walaupun dalam jumlah kecil, hingga pembayaran ganti rugi lahan yang belum tuntas, walaupun sebagian masyarakat ada yang sudah menerima proses relokasi tetapi konflik yang terjadi dalam masyarakat tetap saja terjadi.

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti akan mengangkat penelitian yang berjudul *Konflik Alih Fungsi Tanah pada Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Pelabuhan Palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene)*

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut

1. Apa yang menyebabkan sehingga terjadi konflik di tengah masyarakat dalam pembangunan pelabuhan palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan pelabuhan palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
3. Bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat dalam pembangunan pelabuhan palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara operasional penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terjadi konflik di tengah masyarakat dalam pembangunan pelabuhan palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
2. Mengetahui peran pemerintah dalam pembangunan pelabuhan palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
3. Mengetahui cara mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat dalam pembangunan pelabuhan palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang konflik yang terjadi di masyarakat dalam pembangunan pelabuhan
  - b. Sebagai pembandingan antara teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara mengatasi konflik alih fungsi tanah yang terjadi dalam pembangunan pelabuhan palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Hakikat Masyarakat**

Pengertian masyarakat yaitu sekumpulan orang yang, terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat – istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan memiliki rasa identitas bersama.

Kata masyarakat sendiri pasti sudah sering kita dengar, seperti masyarakat perkotaan, masyarakat desa, masyarakat Bugis, masyarakat Betawi, dan lain lain. Sering kali diartikan secara mudah sebagai warga tetapi konsep masyarakat sendiri cukup rumit untuk dapat dimengerti.

Berdasarkan ilmu etymologi yang mempelajari asal usul kata, istilah masyarakat ini merupakan istilah serapan dari bahasa Arab dan berasal dari kata musyarak yang berarti ikut berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan society. Yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sebuah sistem dan terjadi komunikasi di dalamnya. Oleh karena itu bisa ditarik garis lurus bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, saling berhubungan lalu membentuk kelompok

lebih besar serta memiliki kesamaan budaya, identitas dan tinggal dalam satu wilayah. Oleh karena itu bisa ditarik garis lurus bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, saling berhubungan lalu membentuk kelompok lebih besar serta memiliki kesamaan budaya, identitas dan tinggal dalam satu wilayah.

#### a. Pengertian masyarakat menurut para ahli

Menurut Howard S. Becker (1928:25) masyarakat adalah sebuah hubungan dan mengenai bagaimana kita saling berhubungan satu sama lain; bagaimana kita hidup dengan dengan orang lain dan bagaimana kita hidup tanpa orang lain.. George Simmel (2011; 25) yg melihat masyarakat sebagai hubungan dan interaksi yang sudah tertanam ia menyatakan bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang benar-benar nyata

Berbeda dengan pendapat Emile Durkheim (2011:25) baginya baginya masyarakat berdiri dengan dengan cara yg khas sebagai suatu kenyataan kolektif atas individu-individu yang berada di dalamnya.

Pengertian masyarakat menurut model (R.S.Park dan E.W. Burgess 2011:493) adalah suatu konfigurasi atau sistem yang dipertahankan harmoninya oleh hakikat resiprokal interaksi sosial. (Talcot Parsons 2011:493) Masyarakat merupakan sistem yang dipertahankan oleh pola tertentu yang sama dengan suatu organisme.

Dalam suatu perkembangan daerah, masyarakat bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat dengan pola pikir yang kuno dan hanya dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan saja sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya di masa mendatang bersama orang-orang di sekitarnya meskipun tidak berada dalam golongan yang sama.

Masyarakat awalnya terbentuk dari sekumpulan orang saja. Misalnya sebuah keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga lalu kemudian berangsur-angsur dari sekeluarga membentuk RT dan RW hingga akhirnya membentuk sebuah dusun. Dusun pun kemudian berkembang menjadi beberapa Kecamatan lalu menjadi Kabupaten, Provinsi hingga akhirnya membentuk sebuah Negara. Masyarakat tidak akan pernah terbentuk tanpa kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengahnya. Seorang pemimpin yang akan mengepalai seluruh masyarakat dapat dipilih dengan berbagai cara misalnya lewat pemungutan suara seperti Pemilu atau dilihat dari garis keturunannya. Dalam suatu daerah yang masih kental budaya leluhurnya, pemilihan pemimpin sudah terikat dengan aturan masing-masing yang disebut dengan adat istiadat.

#### b. Pengelompokan masyarakat

Masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan ras, suku dan keturunannya selain itu masyarakat juga bisa dibedakan menurut mata pencaharian di wilayahnya.

Menurut para pakar, lewat pekerjaannya masyarakat bisa dibagi menjadi masyarakat pemburu, masyarakat agraris, masyarakat pastoral nomadis dan masyarakat peradaban. Yang dimaksud dengan masyarakat peradaban adalah masyarakat yang dapat menyesuaikan diri supaya mendapatkan kehidupan layak sesuai dengan lingkungan alamnya lalu menerapkan hasil adaptasinya untuk kehidupan yang lebih maju.

Masyarakat dapat berjalan apabila seluruh komponen di dalamnya berjalan dengan baik. Jika salah satu komponen itu tidak berjalan semestinya maka yang

terjadi adalah keruntuhan di dalam masyarakat itu. Contoh komponen yang dimaksud misalnya adalah keluarga. Apabila dalam kehidupan keluarga tidak harmonis maka akan menghadirkan pribadi bermasalah yang berpotensi menghancurkan seluruh masyarakat. Oleh karena itu beberapa aturan tentang persamaan harus dimasukkan untuk mengakomodir dan mengatur masyarakat. Aturan-aturan tersebut dibuat dan diterapkan oleh pemimpin. Itu lah sebabnya seorang pemimpin haruslah cakap dalam melaksanakan tugasnya, bijak dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat di dalamnya. Bila hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka akan timbul perselisihan pendapat, protes warga hingga demonstrasi yang bertujuan untuk menurunkan jabatan pemimpin masyarakat.

Pengertian masyarakat lainnya juga bisa dibagi lagi menjadi masyarakat transisi, masyarakat non industrial dan masyarakat industrial. Masyarakat peralihan atau transisi yaitu masyarakat yang di dalamnya terdapat perubahan komposisi orang misalnya orang Sunda menikah dengan orang Jawa lalu memutuskan untuk tinggal dan hidup di Jawa atau jika seseorang merubah pekerjaannya dimana pekerjaan itu tidak terdapat pada komposisi masyarakat sebelumnya misalnya seseorang yang memutuskan menjadi ilmuwan di daerah yang mayoritasnya nelayan.

Masyarakat non industrial adalah golongan masyarakat yang masih menerapkan sistem bercocok tanam, bertani, berladang; umunya tinggal di pedesaan sedangkan masyarakat industrial adalah jenis masyarakat yang hidupnya bergantung pada tahapan industri seperti pekerjaan pabrik dan sering berhubungan dengan proses yang serba instan.

Umumnya masyarakat industrial adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Kelemahan yang terjadi pada masyarakat industrial adalah ketidakpuasan golongan pekerja karena upah yang tidak memadai sehingga muncul anggaran tambahan dari pihak pabrik untuk menambah upah pekerja. Hal ini akan sulit diterima dan selalu mendapat penolakan dalam tingkat presentasi tertentu. Efek lainnya adalah pihak pabrik akan merumahkan beberapa orang dan menggantikan peran orang-orang tersebut dengan mesin demi penghematan anggaran dan unsur lainnya. Bila hal ini terjadi maka akan meningkatkan tingkat pengangguran di dalam masyarakat serta berimbas dengan munculnya penyakit social dalam masyarakat yang akan merugikan banyak pihak.

## **2. Konflik**

Konflik berasal dari kata *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Soerjono Soekanto (2013:84) menyatakan bahwa konflik sebagai proses sosial, dimana orang perorang, atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawannya, disertai ancaman atau kekerasan.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial,

konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik

Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli.

a. Teori jonathan turner(2007: 81-82)

Jonathan Turner menguraikan proses terjadinya konflik terdiri atas Sembilan tahap, yaitu :

- 1 Sistem sosial tersusun atas sejumlah unit yang saling tergantung satu sama lain.
- 2 Ada ketidaksamaan distribusi mengenai sumber-sumber langka yang bernilai di antara unit-unit tersebut.
- 3 Unit-unit yang menerima pembagian sumber-sumber secara tidak proporsional mulai mempersoalkan legitimasi dari sistem sosial yang ada.
- 4 Masyarakat yang tidak berupaya mulai menyadari bahwa ada kepentingan bagi mereka untuk mengubah sistem lokasi sumber-sumber yang ada.
- 5 Mereka yang tidak berupaya mulai menjadi emosional.
- 6 Secara berkala muncul ledakan frustrasi, seringkali tidak terorganisasi.
- 7 Intensitas keterlibatan mereka dalam konflik semakin meningkat dan keterlibatan tersebut semakin emosional.
- 8 Berbagai upaya dibuat untuk mengorganisasikan keterlibatan kelompok tak berupaya dalam konflik tersebut.
- 9 Akhirnya, konflik terbuka dalam berbagai tingkat kekerasan terjadi diantara mereka yang tidak berupaya dan mereka yang berupaya.

b. Teori Lewis Coser (2008: 159)

Menurut teori Coser konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Ia menekankan pentingnya konflik untuk mempertahankan keutuhan kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Pemikiran awal Coser tentang fungsi konflik sosial berasal dari George Simmel, yang menyatakan bahwa konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi, atau berkonflik dengan masyarakat lain, dapat memperbaiki kepaduan integrasi. Konflik sebagai agen untuk mempersatukan masyarakat adalah sebuah pemikiran sejak lama diakui oleh tukang propagaanda yang dapat menciptakan musuh yang sebenarnya tidak ada atau mencoba menghembus antagonisme terhadap lawan yang tidak aktif

Konflik juga membantu fungsi komunikasi. Sebelum konflik, kelompok-kelompok mungkin tak percaya terhadap posisi musuh mereka, tetapi akibat dari adanya konflik, posisi dan batasan antarkelompok ini sering menjadi diperjelas. Karena itu individu bertambah mampu memutuskan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam hubungannya dengan musuh mereka. Konflik juga memungkinkan pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik mengenai kekuatan relatif mereka dan meningkatkan kemungkinan untuk saling mendekati atau saling damai.

Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser sering kali disebut teori fungsionalisme karena ia menekankan fungsi konflik sebagai sistem sosial atau masyarakat. Dapat dilihat bahwa konflik bersifat fungsional dan terarah kepada pengintegrasian teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Salah satu hal yang mendukung Coser dengan yang lain adalah dia menganggap konflik untuk mempertahankan keutuhan kelompok.

Lewis Coser (2007:83-84) menyebutkan beberapa fungsi konflik :

1. Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar. Dalam masyarakat yang terancam disintegrasi, konflik dengan masyarakat lain bisa menjadi kekuatan mempersatukan.
2. Konflik dengan kelompok lainnya dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok tersebut dan solidaritas itu bisa menghantarnya kepada aliansi-aliansi dengan kelompok lain.
3. Konflik dapat menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang terisolasi menjadi berperan secara aktif.
4. Konflik juga bisa berfungsi untuk berkomunikasi yaitu dengan mengeluarkan pendapat dengan cara tukar pikiran.

c. Teori C. Wright Mills (2007: 90-92)

Teori yang digunakan oleh Mills bersifat polemis dan menyerang kelompok-kelompok tertentu sehingga banyak yang tidak suka dengannya. Kebanyakan ia menyalahkan kelompok intelektual karena mengabaikan tanggung jawab sosialnya dan mengabdikan dirinya pada penguasa padahal dibelakang layar mereka mengatakan bahwa mereka itu bebas nilai. Mills yakin bahwa menciptakan suatu masyarakat yang baik atas dasar pengetahuan merupakan tanggung jawab kaum intelektual. Tema-tema yang disusun secara khusus dalam Sosiologi Mills adalah hubungan antara alienasi dan birokrasi dan kekuasaan kaum elite.

### 1). Alienasi Birokrasi

Mills berpendapat bahwa kesulitan ekonomi yang dialami oleh pekerja di masa lampau yang saat ini telah diganti oleh ketidakpuasan psikologis yang berakar pada alienasi kaum pekerja dari apa yang mereka kerjakan. Dalam masyarakat modern, pemilik kekuasaan menggunakan kekuasaannya secara tersembunyi untuk melakukan manipulasi demi keuntungan pribadi. Menurutnya, secara politis orang bersikap apatis karena adanya tekanan dari media massa yang bersifat basa basi serta karena dijauhkan dari nilai-nilai tradisi dan akar budaya.

### 2). Kekuasaan Kelompok Elite

Menurut Mills kelompok elite yang berkuasa terdiri dari orang-orang yang memproduksi posisi dominan dalam bidang politik, militer, dan ekonomi. Ketiga bidang itu memiliki hubungan satu sama lain sehingga orang yang berkuasa pada bidang masing-masing bekerja sama untuk menciptakan kelompok elite yang berkuasa. Mills percaya bahwa kekuasaan bisa didasarkan atas faktor-faktor lain dan bukan pada hak milik semata-mata, namun demikian kepentingan yang sama pada kelompok elite itu telah mempersatukan mereka dan mempertahankan ekonomi penting.

Mills berpendapat bahwa kelompok elite yang cenderung melihat masyarakat terbagi secara tajam antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa. Menurutnya, efek dari struktur sosial terhadap kehidupan, dan manipulasi manusia oleh media massa. Ia berpendapat bahwa, hak milik pribadi bukan sebagai satu-satunya sumber kejatahatan didalam masyarakat. Kepemilikan alat-alat produksi dalam skala kecil dan kenyataan tentang adanya kelompok pengusaha kecil yang mandiri berguna untuk mempertahankan kebebasan dan keamanan.

### d. Konflik Menurut Ralf Dahrendorf (2007:77-80)

Teori konflik Ralf Dahrendorf muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori Konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.

Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural dan akibat berbagai kritik, yang berasal dari sumber lain seperti teori Marxian

dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Salah satu kontribusi utama teori konflik adalah meletakkan landasan untuk teori-teori yang lebih memanfaatkan pemikiran Marx. Masalah mendasar dalam teori konflik adalah teori itu tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural-fungsionalnya.

Asumsi Ralf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.

Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi 'otoritas' selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada

lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain : 1. Kelompok Semu (*quasi group*) 2. Kelompok Kepentingan (*manifes*) 3. Kelompok Konflik

Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawahi (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan ingin supaya ada perubahan. Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Lewis Coser dimana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal, sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Menurut Dahrendorf, Adanya status sosial didalam masyarakat (sumber konflik yaitu: Adanya benturan kaya-miskin, pejabat-pegawai rendah, majikan-buruh) kepentingan (buruh dan majikan, antar kelompok, antar partai dan antar Adanya dominasi Adanya ketidakadilan atau diskriminasi. agama). kekuasaan (penguasa dan dikuasai).

Dahrendorf menawarkan suatu variabel penting yang mempengaruhi derajat kekerasan dalam konflik kelas/kelompok ialah tingkat dimana konflik itu diterima secara eksplisit dan diatur. Salah satu fungsi konflik atau konsekuensi konflik utama adalah menimbulkan perubahan struktural sosial khususnya yang berkaitan dengan struktur otoritas, maka Dahrendorf membedakan tiga tipe perubahan. Perubahan keseluruhan personel didalam posisi struktural yakni: Perubahan sebagian personel dalam posisi dominasi. Penggabungan kepentingan-kepentingan kelas *subordinat* dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa. Perubahan sistem sosial ini menyebabkan juga perubahan-perubahan lain didalam masyarakat antara lain Munculnya kelas, *Dekomposisi* tenaga kerja, *Dekomposisi* modal; menengah baru Analisis Dahrendorf berbeda dengan teori Marx, yang membagi masyarakat dalam kelas borjuis dan proletar sedangkan bagi Dahrendorf, terdiri atas kaum pemilik modal, kaum eksklusif dan tenaga kerja. Hal ini membuat perbedaan terhadap bentuk-bentuk konflik, dimana Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (*domination*) dan yang dikuasai (*submission*), maka jelas ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan.

#### a. Penyebab Konflik

- 1). Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung

pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasaterhibur.

- 2). Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

- 3). Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan

kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

4).Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan

terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

b. Akibat konflik

Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (*ingroup*) yang mengalami konflik dengan kelompok lain.
- 2). Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.
- 3). Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga dll.
- 4). Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia.
- 5). Dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat menghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema dua-dimensi; pengertian terhadap hasil tujuan kita dan pengertian terhadap hasil tujuan pihak lainnya. Skema ini akan menghasilkan hipotesa sebagai berikut:

- 1) Pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik.
- 2) Pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan menghasilkan percobaan untuk "memenangkan" konflik.
- 3). Pengertian yang tinggi untuk hasil pihak lain hanya akan menghasilkan percobaan yang memberikan "kemenangan" konflik bagi pihak tersebut.
- 4). Tiada pengertian untuk kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk menghindari konflik.

### 3. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan pengalihan suatu guna lahan satu ke guna lahan yang lain, atau berubahnya fungsi lahan yang biasa digunakan ke kegunaan yang sebelumnya belum pernah digunakan.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan antara lain:

- a. Faktor Kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, seperti, perekonomian masyarakat, jalan transportasi, tempat rekreasi, dan sarana lainnya.
- b. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan pelabuhan, areal estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pemukiman warga. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasinya dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya (sub urban area). Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran pengembangan kegiatan non pertanian mengingat harganya yang relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya.
- c. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
- d. Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional yang sebenarnya penting bagi masyarakat secara keseluruhan.
- e. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari peraturan-peraturan yang ada.

### 4. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau

kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku atau **Robert Dahl (1992:55)** politikus terkemuka ini mendefenisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu yg dengan cara lain tidak akan dilakukannya

Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. **Macht (1992:55)** mengatakan bahwa kekuasaan adalah dimana seseorang memaksakan kehendaknya terhadap orang atau pihak lain. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada Undang-Undang (objek dari kekuasaan).

Menurut (Robert Bierstedt 2011:429) fokus kekuasaan adalah berasal dari kelompok yaitu:

1. Jumlah Manusia
2. Organisasi Sosial
3. Sumber Daya

Beberapa sumber daya yang dapat mengembangkan atau memperkuat posisi kekuasaan, yakni:

1. Kekuasaan Militer, Polisi atau kriminal untuk mengendalikan kekerasan
2. Kekuasaan ekonomi untuk mengendalikan tanah, tenaga kerja,kekayaan maupun produksi
3. Kekuasaan Politik untuk mengendalikan pengambilan keputusan yang sah atau resmi
4. Kekuasaan tradisional atau ideologis untuk mengendalikan sistem kepercayaan dan nilai-nilai, agama, pendidikan, pengetahuan khusus, dan propaganda.
5. Kekuasaan diversioner untuk mengendalikan kepentingan hedonis, rekreasi dan pemenuhan kebutuhan sekunder.

a. Kekuasaan bersifat Negatif

Merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam memengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental. Biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik, mereka hanya berfikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam dalam mengambil suatu tindakan, bahkan mereka sendiri kadang-kadang tidak dapat menjalankan segala perintah yang mereka perintahkan kepada orang atau kelompok yang berada di bawah kekuasannya karena keterbatasan daya pikir tadi. dan biasanya kekuasaan dengan karakter negatif tersebut hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu. karena mereka tidak memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk menghasilkan apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersebut biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya.

Di negara demokrasi, dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Partai partai politik berusaha untuk merebut konstituen dalam masa pemilu. Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung seperti yang terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2004 maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

## B. Sifat kekuasaan

Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering kita dengar, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Power tends to corrupt*. Kekuasaan dapat dikatakan melekat pada jabatan ataupun pada diri orang tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Position Power, kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi.
2. Personal Power, kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya.

### c. Kekuasaan Politik

Menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani *Politeia* (berarti kiat memimpin kota (*polis*)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita (untuk saat itu) maka kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka..Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik.

Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (*authority*), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi. Sedangkan kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional.

#### d. Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk social memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu factor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan.. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Sementara berbicara tentang sumber-sumber kewenangan, maka terdapat 3 ( tiga ) sumber kewenangan yaitu :

- 1). Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.
- 2). Sumber Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.
- 3). Sumber Mandat yaitu pelepasan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Dari ketiga sumber tersebut maka merupakan sumber kewenangan yang bersifat formal, sementara dalam aplikasi dalam kehidupan social terdapat juga kewenangan informal yang dimiliki oleh seseorang karena berbagai sebab seperti : Kharisma, kekayaan, kepintaran, ataupun kelicikan.

## **5. Pembangunan**

Pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah satu dengan daerah lainnya. Namun secara umum ada suatu

keepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Walt Rostow (2011: 99-100) Menguraikan secara secara rinci teori pertumbuhan ekonomi, di dalam langkah-langkah pertumbuhan ekonominya. Keutamaannya ia membangun suatu lima bentuk model transisi dari suatu ekonomi tradisional pada suatu kompleks industri modern ia menyatakan bentuk tersebut adalah masyarakat tradisional, prasyarat untuk keberangkatan, keberangkatan, pengarah ke kedewasaan dan umur konsumsi yang tinggi. Ia percaya bahwa tiap-tiap masyarakat akan menerobos lima langkah-langkah pertumbuhan ekonomi memimpin akhirnya sampai akhir tahap usia konsumsi tinggi

Seers (2011:201) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan , ketidakseimbangan pendapatan dan pengangguran. sedangkan Wang dan Dissanayake (2011:216) mereka mendefenisikan pembangunan sebagai sebuah proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup seluruh atau mayoritas orang tanpa melakukan hal hak kekerasan pada lingkungan alam dan budaya di mana mereka (orang-orang) berada, serta yang bermaksud melibatkan mayoritas orang agar sedekat mungkin dengan kegiatan usaha ini dalam menjadikan mereka sebagai penguasa dari takdir mereka sendiri

Denis Goulet (2011: 215) seorang pakar ekonomi politik, melihat pembangunan adalah membebaskan manusia dari perbudakan alam, dari keterbelakangan ekonomi dan institusi-institusi teknologis opresif, dari struktur-struktur kelas yang tidak adil dan para pengeksploitasi politik, dari perampasan

fisik dan budaya ringkasanya, dari semua perantara kehidupan yang tidak manusiawi.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berlangsung pada level makro dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*). Pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagai dikemukakan oleh para ahli diatas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

## 6. Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh,

naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penumpang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (PP. 69/2001 tentang Kepelabuhan).Kepelabuhan sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah

Menurut Ensiklopedia Indonesia Pelabuhan adalah tempat kapal berlabuh (membuang sauh). Pelabuhan modern cukup dilengkapi dengan los-los dan gudang besar, beserta pangkalan, *dok* dan *crane* yang kuat untuk membongkar dan memuat perbekalan, batubara dan lain lain.

Pelabuhan dapat dibagi dalam beberapa kategori menurut penggunaannya, antara lain pelabuhan ikan, pelabuhan minyak, pelabuhan barang, pelabuhan penumpang, pelabuhan campuran, pelabuhan militer. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah pelabuhan penumpang

Pelabuhan penumpang adalah pelabuhan yang dibangun untuk memberikan fasilitas bagi kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian. Pada pelabuhan penumpang dilengkapi dengan stasiun penumpang yang mencakup fasilitas-fasilitas seperti kantor imigrasi, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai pelayaran, dan sebagainya. Barang-barang yang perlu

dibongkar muat tidak begitu banyak, sehingga gudang barang tidak perlu besar. Untuk kelancaran keluar masuknya penumpang dan barang, sebaiknya jalan masuk dan keluar dipisahkan. Penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung ke kapal, sedang barang-barang melalui dermaga.

Dalam perencanaan pelabuhan penumpang dan barang harus

diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penyediaan fasilitas dasar pelabuhan penumpang dan barang.
- b) Tersedianya ruang gerak yang luas bagi kapal di dalam pelabuhan.
- c) Alur yang baik untuk memudahkan kapal keluar masuk pelabuhan.
- d) Tersedianya fasilitas pendukung seperti air bersih, BBM, dll.
- e) Mempunyai jaringan angkutan darat yang mudah dengan daerah pendukungnya.

Pemilihan Lokasi Pelabuhan

a. Tinjauan topografi dan geologi

Keadaan topografi daratan dan bawah laut harus memungkinkan untuk membangun suatu pelabuhan dan kemungkinan untuk pengembangan di masa akan datang. Daerah daratan harus cukup luas untuk membangun suatu fasilitas pelabuhan seperti: dermaga, jalan, gudang dan daerah industri.

Kondisi geologi menentukan sulit tidaknya melakukan pengerukan daerah perairan dan kemungkinan untuk menggunakan hasil pengerukan tersebut untuk menimbun daerah lain.

b. Tinjauan pelayaran

Pelabuhan yang akan dibangun harus mudah dilalui kapal-kapal yang akan menggunakannya. Kapal yang berlayar dipengaruhi oleh

faktor- faktor alam seperti: angin, gelombang, arus. Faktor tersebut semakin besar apabila pelabuhan terletak di pantai yang terbuka ke laut dan sebaliknya pengaruhnya berkurang pada pelabuhan yang terletak pada daerah yang terlindung secara alam.

c. Tinjauan gelombang dan arus

Gelombang menimbulkan gaya yang bekerja pada kapal dan bangunan pelabuhan. Untuk menghindari gangguan gelombang tersebut dibuat bangunan pelindung yang disebut pemecah gelombang.

d. Tinjauan kedalaman air

Kedalaman laut sangat berpengaruh dalam perencanaan pelabuhan. Dilaut yang mengalami pasang surut variasi muka air kadang-kadang cukup besar. Tinggi pasang surut yang kurang dari 5 meter masih dapat dibuat pelabuhan terbuka. Bila pasang surut lebih dari 5 meter, maka harus dibuat suatu pelabuhan tertutup yang dilengkapi dengan pintu air untuk memasukkan dan mengeluarkan kapal.

## B. Kerangka Pikir

Konflik dalam masyarakat sering kita jumpai karena disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian keinginan dan harapan antara pihak satu dengan pihak lainnya, kepentingan masyarakat dan pemerintah sering tidak bersinergi, salah satu penyebab hal ini disebabkan oleh pemerintah yang kurang bersosialisasi di masyarakat. Sosialisasi dalam masyarakat ini sangat penting dilakukan oleh

pemerintah jika ingin melakukan suatu pembangunan, apalagi pembangunan tersebut menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat seperti tempat tinggal, lahan perkebunan dan hal-hal penting lainnya, karena dengan adanya sosialisasi yang dilakukan maka suatu kebijakan tersebut akan di kenal dan dipahami oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah di masyarakat sehingga proses pembangunan dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya pertentangan di masyarakat terlebih dahulu.

Hal tersebut dapat kita jumpai dalam pembangunan pelabuhan palipi kecamatan sendana kabupaten majene. Pembangunan Pelabuhan merupakan hal yang sangat baik dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat karena dengan adanya pelabuhan maka masyarakat disekitar akan mendapatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan daerah otomatis akan meningkat dan memudahkan masyarakat menggunakan transportasi laut. Tetapi pembangunan pelabuhan palipi menjadi pertentangan di masyarakat setempat. Masyarakat menentang pemerintah karena pembangunan pelabuhan yang dilakukan pemerintah mengorbankan lahan tempat tinggal masyarakat, lahan tersebut menjadi sengketa karena masyarakat tetap bertahan dengan lahan tempat tinggal mereka sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mantap membangunnya, walaupun tujuan pemerintah baik tetapi di satu sisi pembangunan ini membutuhkan lahan yang tidak sedikit mengingat lahan semakin sempit maka pemerintah mengorbankan lahan tempat tinggal milik masyarakat yang merupakan hal yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat, karena pengambil alihan lahan mereka otomatis akan mengganggu kehidupan masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat digambarkan dalam skema kerangka pikir berikut:

**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi pada daerah tertentu. **Penelitian kualitatif** adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam

dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan interviewer atau moderator group periset menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam grup. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari interviewer atau moderator group.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di pelabuhan Palipi Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

### **C. Objek dan Subjek**

Objek penelitian adalah fokus atau sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah masyarakat disekitar pembangunan pelabuhan Palipi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Sedangkan Subjek penelitian ini adalah individu, benda atau organism, yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut sebagai informan yaitu pelaku yang memahami objek penelitian. Jadi informan yang dimaksudkan disini adalah orang yang memberi informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti,

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat sekitar dengan jumlah responden 10 orang dan pemerintah setempat yang terdiri dari Kepala Desa Sendana beserta sekretaris Desa dan Camat beserta Sekretaris Camat

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa media, diantaranya:

##### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik penelitian dengan mendatangi lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

##### 2. Wawancara

Metode wawancara, dengan memanfaatkan metode ini, maka penulis dapat melakukan penyampaian sejumlah pertanyaan kepada responden secara lisan dengan menggunakan panduan wawancara. Menurut Sutrisno Hadi, mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan teknik interview dan juga kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya

3. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si peneliti.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon.

#### 1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan lancar. Adapun contoh wawancara terstruktur tentang tanggapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

#### 2. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti.

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

### 3. Kepustakaan

Tindakan kepustakaan ini dianggap perlu dilakukan dalam rangka pengambilan data-data yang relevan dan akan digunakan dalam berbagai penelitian dengan memanfaatkan berbagai literatur yang berupa buku-buku kutipan dan data yang diperoleh di luar dari hasil temuan lapangan.

## **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, dimana data yang diperoleh di lapangan, diolah kemudian disajikan dalam bentuk tulisan. Menyangkut analisis data kualitatif, menganjurkan tahapan-tahapan dalam menganalisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu menyaring data yang diperoleh di lapangan kemudian dituliskan kedalam bentuk uraian atau laporan terperinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih, difokuskan pada bantuan program, disusun lebih sistematis, sehingga mudah dipahami.
2. Penyajian data, yaitu usaha untuk menunjukkan sekumpulan data atau informasi, untuk melihat gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu dari penelitian tersebut.
3. Kesimpulan merupakan proses untuk menjawab permasalahan dan tujuan sehingga ditentukan saran dan masukan untuk pemecahan masalah.

#### **F. Validitas Data**

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan uji kredibilitas. Menurut Sugiyono (2013) untuk menguji kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan: dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini akan membentuk hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin baik dan kehadiran peneliti tidak lagi dianggap sebagai orang asing yang mengganggu perilaku masyarakat yang sedang dipelajari.

2. Meningkatkan ketekunan: yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis, karena peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.
3. Triangulasi: yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga jenis triangulasi yaitu pertama, triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kedua, triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Ketiga, triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada pagi hari, siang hari dan sore hari biasanya akan berbeda.
4. Analisis kasus negatif: yaitu kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Disini peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan ditemukan, maka data tersebut sudah dapat dipercaya.
5. Menggunakan bahan referensi: yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

6. Mengadakan *membercheck*: yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut dapat dikatakan valid, sehingga semakin kredibel data tersebut dan begitupun sebaliknya. Apabila mengacu pada konsep kredibilitas tersebut, maka dalam penelitian ini pendekatan yang paling tepat untuk digunakan adalah triangulasi.

#### **G. Instrument Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:1630) bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, sedangkan instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya.

Menurut Suharmi Arikunto (2006:149) ada beberapa instrument yang namanya sama dengan metodenya,antarlain adalah:

- 1) . Instrument untuk metode tes adalah tes atau soal tes
- 2). Instrument untuk metode angket atau kuesioner adalah angket atau kuesioner
- 3). Instrument untuk metode observasi adalah cek – list
- 4). Instrument untuk metode observasi adalah pedoman observasi atau dapat juga cek – list

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengertian pengumpulan data dan instrumen penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengungkap berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan berbagai cara dan metode agar proses ini berjalan secara sistematis dan lebih dapat dipertanggung jawabkan kevaliditasnya.



## **PERTANYAAN WAWANCARA**

### **WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT**

*Sejak kapan anda bertempat tinggal di desa palipi.....?*

*Apakah lahan tempat tinggal anda sekarang ini berstatus sah milik anda .....?*

*Bagaimana pendapat anda terhadap pembangunan pelabuhan palipi ini.....?*

*Apakah pembangunan pelabuhan palipi mempengaruhi pendapatan anda.....?*

*Bagaimana respon anda tentang pemerintah yang mengambil lahan tempat tinggal anda untuk pembangunan pelabuhan.....?*

*Apakah anda pernah memprotes pembangunan pelabuhan ini secara langsung kepada pemerintah.....?*

*Menurut anda apakah rencana pemerintah tentang pelabuhan palipi sudah tepat.....?*

*Apakah pemerintah membayar ganti rugi penggunaan lahan anda dengan harga yang setimpal.....?*

*Apa Keinginan anda kedepannya tentang adanya pembangunan pelabuhan palipi.....?*

### **WAWANCARA KEPADA PEMERINTAH**

*Apa alasan pemerintah sehingga membangun pelabuhan di desa palipi.....?*

*Bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan pelabuhan palipi.....?*

*Sejauh mana pembangunan pelabuhan palipi ini berjalan.....?*

*Masalah apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan pelabuhan palipi.....?*

*Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.....?*

*Apakah pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dalam pembangunan pelabuhan palipi ini.....?*

*apakah pembangunan pelabuhan palipi ini dapat merubah kehidupan ekonomi masyarakat*

*Bagaimana proses ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan pelabuhan palipi.....?*

*Apakah pembangunan pelabuhan palipi sudah tepat.....?*

*Apa harapan pemerintah tentang pe mbangunan pelabuhan palipi di masyara*



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Wilayah Penelitian

##### 1. Profil Wilayah Penelitian

Karakteristik dan identifikasi wilayah penelitian yang akan disajikan dalam bab ini yakni letak geografis dan keadaan penduduk Kecamatan Sendana Kabupaten Majene merupakan salah satu Kabupaten dari lima Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Dalam hal ini kita dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan berikut:

##### a) Letak Geografis

Posisi Kabupaten Majene yang terletak pada posisi  $2^{\circ} 38' 45''$  -  $3^{\circ} 38' 15''$  LS dan  $118^{\circ} 45' 00''$  -  $119^{\circ} 4' 45''$  BT, dengan berbatasan di sebelah utara Kabupaten Mamuju, sebelah timur Kabupaten Polewali Mandar, sebelah selatan Teluk Mandar dan sebelah barat Selat Makassar. Ibu kota Kabupaten Majene terletak di Kecamatan Banggae dengan luas perkotaan 5.515 km yang berada di posisi selatan Kabupaten Majene, jam tempuh sekitar 3 jam sampai 4 jam dari ibu kota Sulawesi Barat Mamuju yaitu kurang lebih 142 km. Kabupaten Majene memiliki 8 kecamatan yaitu Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammero'do sendana, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda yang mempunyai 40 desa dan kelurahan

Daerah penelitian ini terletak pada salah satu Desa yaitu desa sendana yang

berada di wilayah Kecamatan Sendana. Lokasi penelitian ini secara administratif mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Desa Tallu Banua
- 2) Sebelah timur : Desa Pundau
- 3) Sebelah barat : Selat Makassar
- 4) Sebelah selatan : Teluk Mandar

Pada umumnya di Desa Sendana hanya memiliki 2 (dua) musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Kondisi iklim berdasarkan data tahun 2014 tercatat bahwa suhu udara maksimum rata-rata pada siang hari mencapai 35° C dan suhu minimum rata-rata pada malam hari berkisar 20°C.

Desa Sendana memiliki areal seluas 10,06 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.520 jiwa yang tersebar di 1 desa dan 4 dusun dapat dilihat sebagai berikut:

*Tabel 4.1*

**Jumlah Penduduk Desa Sendana**

No	Nama Dusun	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	L	P
1	Dusun Palipi	2,09	89	411	196	215
2	Dusun Palipi Selatan	2,25	96	462	221	241
3	Dusun Palipi Utara	3,29	57	317	152	165
4	Dusun Rate	2,43	62	330	154	176
	Jumlah	10,6	304	1.520	723	797

*Sumber:* Kantor Desa Sendana (2015)

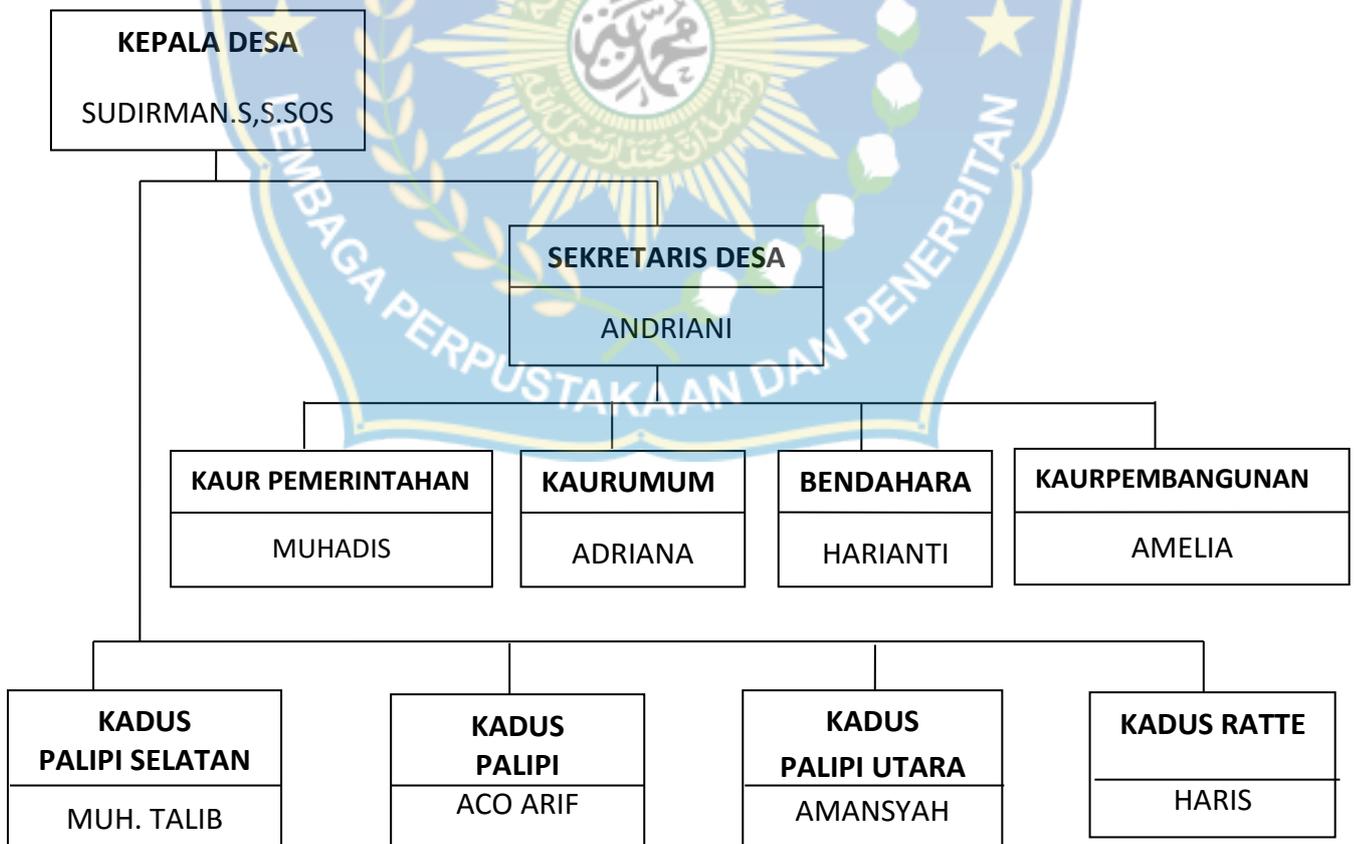
Wilayah Desa Sendana terletak dari dataran rendah sehingga mayoritas masyarakatnya memiliki pekerjaan bertani dan sebagian lagi nelayan hingga masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari berkebun. Namun ada pula yang bekerja pada sektor pemerintahan seperti pegawai negeri sipil

Secara geografis Desa Sendana berada di dataran rendah dan wilayah pesisir pantai sehingga mayoritas penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor pertanian dan nelayan

#### b) Struktur Organisasi desa

Adapun struktur organisasi Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene adalah sebagai berikut.

#### STRUKTUR ORGANISASI DESA SENDANA



### c) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden yang dinyatakan dalam satuan tahun. Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kemampuan berfikir dan mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Di Desa Sendana tingkat pendidikan di klasifikasikan dalam dalam 3 kategori yaitu katagori rendah jika kategori tidak sekolah sampai SD, katagori menengah jika sekolah dari SMP-SMA dan katagori tinggi jika pendidikannya sampai Perguruan Tinggi. Penggolongan kategori pendidikan responden dapat di lihat dalam tabel.

Tabel . Klasifikasi Responden Berdasarkan Katagori Pendidikan di Desa Sendana Kecamatan Sendana

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden
1	Tidak sekolah- SD	1
2	SMP-SMA	9
3	Akademik/Perguruan Tinggi	0
Jumlah		10

Tabel menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di lokasi penelitian lebih banyak tingkat pendidikannya kategori menengah. Responden tidak melanjutkan

tingkat jenjang yang lebih tinggi karena terkendala kurangnya biaya dan kemauan.

#### d) Keadaan penduduk

##### 1. DusunPalipi

Dalam wilayah Dusun palipimemiliki jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berjumlah 411 Jiwa. Untuk lebih jelas jumlah penduduk Dusun patandedapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 2**

#### **Jumlah Penduduk DusunPalipiMenurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	196
2.	Perempuan	215
<b>Total</b>		<b>411</b>

*Sumber* : Kantor Desa Sendana(2015)

Penduduk Dusun palipi berjumlah 411 Jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 196 Jiwa dan selebihnya berjenis kelamin perempuan sebanyak 215 Jiwa. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan, serta banyak pula yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

## 2. Dusun Palipi Selatan

Dalam wilayah Dusun Palipi Selatan, memiliki jumlah penduduk 462 Jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Dusun Palipi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 3**

### **Jumlah Penduduk Dusun Palipi Selatan Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	221
2.	Perempuan	241
<b>Total</b>		<b>462</b>

Sumber : Kantor Desa Sendana(2015)

Penduduk Dusun Palipi Selatan berjumlah 462 Jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 221 Jiwa dan selebihnya berjenis kelamin perempuan sebanyak 241 Jiwa. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan, namun ada pula yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## 3. Dusun Palipi Utara

Di wilayah Dusun palipi Utara, tersebar penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berjumlah 317 Jiwa. Untuk lebih jelas jumlah penduduk Dusun palipi Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4****Jumlah Penduduk Dusun Palipi Utara Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	152
2.	Perempuan	165
<b>Total</b>		<b>317</b>

Sumber : Kantor Desa Sendana(2015)

Penduduk Dusun palipi utaraberjumlah 317 Jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 152 Jiwa dan selebihnya berjenis kelamin perempuan sebanyak 165 Jiwa. Sebagian besar masyarakat yang berdomisili berprofesi sebagai petani dan nelayan, hal ini disebabkan karena kondisi di daerah tersebut adalah daerah pantai dan sangat cocok untuk kegiatan pertanian.

**4. Dusun Ratte**

Dusun Ratte ini memiliki penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berjumlah 330 Jiwa. Untuk lebih jelas jumlah penduduk Dusun Kore-korea dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5****Jumlah Penduduk Dusun Kore-korea Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	154

2.	Perempuan	176
<b>Total</b>		<b>330</b>

*Sumber : Kantor Desa Sendana(2015)*

Penduduk Dusun kore-korea berjumlah 330 Jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 154 Jiwa dan selebihnya berjenis kelamin perempuan sebanyak 176 Jiwa. Sama dengan dusun yang lain mayoritas masyarakat yang mendiami daerah tersebut kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan sebagiannya pegawai negeri sipil.

## **2. Profil Informan**

Pada profil informan ini oleh peneliti menyajikannya berdasarkan atas gambaran tentang identitas informan yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria dalam penentuan subjek atau informan yang mendukung diperolehnya hasil penelitian yang sesuai dengan kenyataan pada kehidupan masyarakat Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat sekitar dengan jumlah responden 10 orang dan pemerintah setempat yang terdiri dari Kepala Desa Sendana beserta sekretaris Desa dan Camat beserta Sekretaris Camat

Adapun profil informan yaitu :

### a. Daftar informan

Berikut adalah beberapa daftar informan dalam penelitian berdasarkan jenis kelamin dan usia.

**Tabel 4.6****Daftar Informan dari Masyarakat dan Pemerintah Desa**

No.	Nama Responden	Umur/tahun	Jenis Kelamin L/P
1.	Rusman (Sekcam)	45	L
2.	Sudirman (Kades)	43	L
3.	Ani	35	P
4.	Aco	37	L
5.	Basri	47	L
6.	Wiranti	35	P
7.	Munawarah	25	P
8.	Mansur	34	L
9.	Kundin	46	L
10.	Ahmad	31	L
11	Iis	27	P
12	Saifullah	35	L

*Sumber:* Hasil Wawancara 2015

Jumlah informan yakni 10 orang dari masyarakat dan 2 orang dari pemerintahan yang terdiri dari laki-laki berjumlah 8 dan perempuan 4 orang yang tersebar di 1 desa dan 4 dusun yang berada di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

## **B. Hasil Penelitian**

Setelah mengadakan observasi dan wawancara dengan beberapa informan maka pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat disimak sebagai berikut :

### **1. Penyebab konflik dalam pembangunan pelabuhan palipi**

Dalam sebuah daerah pasti terjadi suatu proses perubahan apa lagi dalam proses pembangunan maka akan muncul dampak positif bagi masyarakat karena akan menambah fasilitas yang ada di masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat namun sebuah pembangunan juga tidak selalu memiliki dampak positif saja namun juga ada dampak negatif yang terjadi yang tentunya mengganggu kehidupan masyarakat. contohnya dalam hal pembangunan pelabuhan palipi misalnya, yang dalam pembangunannya ada suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ini berarti bahwa tidak semua pembangunan itu berdampak positif dalam kehidupan masyarakat . Ini dapat kita lihat dalam tanggapan masyarakat terhadap pembangunan pelabuhan palipi yang mempunyai pendapat yang beragam.

Pendapat masyarakat tentang adanya pembangunan pelabuhan ini sangat beragam mulai dari menerima adanya pembangunan ini karena alasan kebutuhan akan fasilitas masyarakat karena berada di daerah pantai dan sesuai dengan profesi masyarakat, juga ada yang berpendapat akan merubah perekonomian masyarakat mulai dari yang berprofesi sebagai nelayan maupun non nelayan dan sampai ada yang menolak karena relokasi tanah yang terjadi serta pembangunan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Sesuai dengan pendapat dari beberapa informan yang telah dipilih memahami dan memberikan pendapatnya tentang penyebab konflik yang terjadi di masyarakat tentang adanya pembangunan pelabuhan ini. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh salah satu informan yang bernama ibu Ani (35 tahun) mengatakan bahwa:

*“saya sudah lama tinggal disini dan ini tanahku berstatus sahji karena ada surat-suratnya semua, ini tanah nabeli orang tuaku sejak tahun 70-an tapi pembangunan pelabuhan ini sebenarnya tidak sesuai dengan harapkanku karena na ambil tanahku yang sudah kutempati sejak lama karena kalo na ambil ini tanahku, saya mau tinggal dimana kasian saya juga ini orang yang tidak punya. Kalo masalah perekonomian tentang pembangunan ini mungkin ada perubahan karena bisaka jual-jualan di dekat pelabuhan kalo memang selesaimi ini pelabuhan tapi itu yang tidak kusetujui tentang pengambilan lahan yang tidak sesuai ganti ruginya ”.*  
(wawancara 12 Agustus 2015)

Sesuai dengan pernyataan ibu Ani, seorang informan bernama Aco(37 tahun) mengungkapkan bahwa:

*“ini sebenarnya pembangunan pelabuhan tidak setujuka apa na ambil tanahku tidak mauka saya direlokasi karena ini tanah sudah menjadi sah milikku dan ini juga tanah dari orang tuaku karena kalo pindahka butuhka lagi itu biaya tambahan sementara sekarang saya lagi susah pemerintah juga memberikan ganti rugi yang tidak sebanding dengan harga tanah jadi saya belum terima”* (Wawancara 14 Agustus 2015)

Dari kedua pendapat diatas dapat kita lihat adanya ketidak harmonisan antara masyarakat dan pemerintah karena adanya perbedaan pendapat dan perbedaan keinginan atau tujuan, ini adalah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Gambaran kejadian ini dapat kita lihat dari teori Teori konflik Ralf Dahrendorf yang mengatakan bahwa “suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain

guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya”

Selain itu beberapa pendapat informan tentang penyebab konflik pembangunan pelabuhan palipi yang mengeluhkan tentang dana ganti rugi seperti pendapat informan yang bernama Pak Basri (47 tahun):

*”kalo saya pembangunan pelabuhan palipi ini bagusji karena ada fasilitas warga yang dibangun tapi masalahnya disini saya tidak mau direlokasi karena tanahku yang berstatus sah mau dibeli dengan harga yang murah 200 rb/m saya mau 350 rb/m Pemerintah disini sebenarnya harus bisa sesuaikan harga supaya masyarakat seperti saya bisa pindah karena sekarang harga tanah itu mahal dan saya juga berharap ke pemerintah supaya benar-benar serius dalam pembangunan ini supaya jangan Cuma ambil tanah tapi pembangunannya tidak jalan karena lamami ini pelabuhan belum rampung” (Wawancara 17 Agustus 2015)*

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh salah satu responden yang bernama Wiranti (35 tahun) dia mengeluhkan tentang dana ganti rugi dari pemerintah.

*“ ini saya sudah berkeluarga baru pemerintah mau ganti rugi dengan harga yang murah jelas tidak saya terima, karena saya pemilik sahnya, saya mau ini harganya tanahku saya yang tentukan, belumpi juga kebutuhan lain kalo pindah rumah pasti akan banyak butuh dana.”*

*Lanjut perkataan Wiranti “ saya punya sepupu juga dulu tinggal ditempat ini dia pindah kasian karena kolom rumahnya dimasuki air laut gara penimbunan, terpaksa dia nabongkar rumahnya untuk pindah, tadinya posisinya di pinggir jalan pindah ke pinggir pantai.*

*Kalo harapan saya ke pemerintah bisa lebih baik ke masyarakat kasian soal ganti rugi ini, seperti di Mamuju penggantian lahan itu bagus karena ganti rugi lahan sesuai, tidak kaya disini murah sekali ganti ruginya” (Wawancara 19 Agustus 2015)*

Dilihat dari beberapa pendapat informan di atas tentang pembangunan pelabuhan palipi dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari masyarakat tidak mau direlokasi karena mengenai adanya ketidak sesuaian dalam penggantian harga

tanah dari pemerintah, seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan tentang ganti rugi tanah pada masyarakat karena lahan tempat tinggal atau tanah sekarang harganya sangat mahal sehingga masyarakat merasa berat untuk pindah karena harus menanggung dana yang tidak cukup belum lagi akan membangun rumah baru pasti akan membutuhkan dana yang lebih itu artinya masyarakat tidak setuju karena alasan utamanya adalah permasalahan perekonomian. bahkan ada masyarakat yang merasakan adanya diskriminasi dalam pembangunan pelabuhan ini seperti yang di utarakan oleh Munawarah (25 tahun) dia menjelaskan bahwa pembangunan pelabuhan ini sering dijadikan kambing hitam oleh pemerintah yang menangani pelabuhan ini pernyataannya sebagai berikut:

*“petugas pengawas pembangunan pernah menyalahkan letak rumah saya karena posisi rumahku dekat dengan tanggul, ada pernah kejadian tanggul yang roboh, saya disuruh pindah karena posisi rumah saya yang sebabkan tanggul roboh hingga saya ingin direlokasi, kan tidak masuk akal kalo posisi tanah dan saya tidak berbuat apa-apa saya langsung yang di salahkan atas kejadian itu ”(21 Agustus 2015)*

Pernyataan yang menyalahkan kinerja pemerintah yang terkait dengan pembangunan ini juga terlontar oleh bapak mansur (34 Tahun) yang mengatakan

*“pemerintah seharusnya bisa lebih memperhatikan masyarakat karena ini tanah tempat tinggalta tidak seharusnya pemerintah itu bersikap tidak peduli sama tempat tinggalta karena ini masalah pembangunan sangat napengaruhi kehidupan masyarakat” (22 Agustus 2015)*

Pernyataan diatas menggambarkan betapa pemerintah belum dapat memberikan kepuasan oleh masyarakat terkait pembangunan ini karena pemerintah hanya memberikan insentif ganti rugi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat target penggantian dari lahan tidak lebih dari Rp 200 ribu/m dan masalah yang lain juga menyangkut tentang kualitas bangunan tanggul yang

ada. seperti yang diutarakan oleh Ralf Dahrendorf yang teori konfliknya memusatkan pada adanya otoritas dan Ralf mengatakan “Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan ingin supaya ada perubahan”

Bapak Saifullah (35 Tahun) yang mengatakan

*“Menurut saya adek kenapa selama ini masyarakat desa sendana menolak direlokasi, karena begini pembangunan cuma tanahnya saja masyarakat diambil baru ditimbun cuma sampai disitu saja tidak ada diliat tindakan pembangunan jadilah seperti tanah kosong, apaji yang sering naperbaiki cuma tanggul-tanggul yang roboh saja, padahal tanggulnya belum lama jadi, mungkin kualitas dari pembangunannya tidak bagus, harapanku supaya pemerintah cepat membangun ini pelabuhan supaya masyarakat bisa merasakan ini pelabuhan” (wawancara 24 Agustus 2015)*

Dari beberapa diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat juga memprotes kinerja pemerintah dan tentunya masyarakat ingin ada perubahan dari cara pemerintah pembangun pelabuhan ini mulai dari seperti di awal pembahasan tentang ganti rugi lahan dan sampai pada keinginan masyarakat akan perbaikan kualitas bangunan gambaran kejadian ini dapat kita lihat oleh pendapat Ralf Dahrendorf yang teori konfliknya memusatkan pada adanya otoritas dan Ralf mengatakan “Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan ingin supaya ada perubahan” perubahan yang dimaksudkan disini pemerintah tidak hanya membangun begitu saja tapi juga harus memperhatikan nasib para warga karena kebanyakan kasus seperti ini pembebasan lahan berakhir pada salah satu pihak akan dirugikan.

Masyarakat mempunyai suatu keinginan dan pendapat sendiri mengenai kinerja pemerintah yang menganggap kinerjanya kurang memuaskan sehingga jadilah konflik. Hal ini serupa dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa konflik sebagai proses sosial, dimana orang perorang, atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawannya, disertai ancaman atau kekerasan

Komentar lainnya juga terlontar dari responden yang cukup positif kepada pemerintah tentang adanya pembangunan ini seperti bapak Kundin (46 Tahun)

*“kalo saya tidak masalah direlokasika karena keluarga saya keluarga nelayan jadi mungkin bisa merubah perekonomian jadi lebih bagus dan ini pelabuhan ikan mudah mudahan bisaka lebih mudah juga meningkatkan pendapatankuseharusnya cepat dibangun ini supaya masyarakat bisa percaya kalo ini pelabuhan benar-benar dibangun karena lama sekalimi ini belum jadi jadi” (Wawancara 26 Agustus 2015)*

Komentar bapak kundin diatas dia memiliki harapan agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar karena rencana pembangunan ini memang sudah lama sejak tahun 2012 namun sampai sekarang masih belum rampung bahkan masih hanya timbunan dengan beberapa bangunan kecil mungkin karena berbagai masalah yang dihadapi. Ini adalah salah satu yang membuat masyarakat menjadi ragu akan kinerja pemerintah dalam pembangunan pelabuhan. Ini juga adalah satu pemicu adanya konflik di masyarakat dalam pembangunan ini karena tidak adanya bukti yang dilihat oleh masyarakat tentang keseriusan pemerintah dalam pembangunan ini.

Senada dengan komentar pak Ahmad (31 tahun) dia juga menegaskan bahwa pemerintah sangat lamban dalam hal pembangunan pelabuhan ini komentarnya dapat dilihat berikut

*“menurut saya pembangunan ini sudah bagus karena ini pelabuhan memang dibutuhkan masyarakat desa apalagi kita ini nelayan ikan, tiap hari menangkap ikan, saya sudah sepakat dengan harga tanahku, tapi saya juga sudah lama melihat ini pembangunan lambat sekali tidak ada perubahan sedangkan pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa lahan yang siap dijadikan bagian dari pelabuhan dan sebagian juga sudahmi ditimbungi pasir tapi pembangunan belumpi ada,”(Wawancara 26 Agustus 2015)*

Kita dapat melihat bahwa komentar diatas permasalahannya bukan hanya masalah pembangunan yang mengambil lahan masyarakat tapi juga terkendala pada kinerja pembangunan dari pemerintah itu sendiri. Ini adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah karena disini yang menjadi korban adalah masyarakat yang belum merasakan manfaat dari pembangunan ini. Komentar lainnya juga disampaikan oleh ibu Iis (27 Tahun) yang mengatakan bahwa,

*“saya juga sempat berselisih tentang tanahku ini, mau dibangun ini pelabuhan karena pemerintah kasika harga murah tapi saya juga mengalah untuk harga tanah karena saya juga takut berselisih terpaksa saya menumpang dulu sementara kerumah saudara iparku kebetulan tidak jauhji dari ini lokasi,bagusji ini kalo ada pembangunan pelabuhan ikan bisa bikin tambah banyak penghasilan karena saya juga nelayan , tap saya liat pembangunannya belumpi selesai, tanahku sudahmi saya jual ke pemerintah” (wawancara 26 Agustus 2015)*

Ibu Iis adalah salah satu masyarakat yang menerima dan mau direlokasi tetapi hal ini tidak menjadikan ibu Iis menjadi tenang karena dia direlokasi bukan karena keinginannya sendiri tetapi melihat kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah atau sang penguasa seperti yang dikatakan Macht (1992:55) mengatakan bahwa kekuasaan adalah dimana seseorang memaksakan kehendaknya terhadap orang atau pihak lain. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg

memerintah dan ada yg diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan.

Dari pernyataan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan pelabuhan ini adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib masyarakat yang tanahnya yang diambil mulai dari masalah dana ganti rugi, pembangunan yang mandeg dan kualitas bangunan yang ada kurang baik itu semua dapat memicu masyarakat menjadi tidak pro terhadap pembangunan pelabuhan palipi ini sesuai dengan teori Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (*domination*) dan yang dikuasai (*submission*), maka jelas ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan.. Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (*domination*) dan yang dikuasai (*submission*), maka jelas ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan.

Dan untuk keterangan dari masyarakat di atas kita juga harus melihat pernyataan dari pemerintah sendiri sebagai pemimpin dari masyarakat.

## **2. Peran pemerintah dalam pembangunan pelabuhan palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.**

Berikut hasil wawancara pemerintah dari kecamatan Wakil Camat Bapak Rusman (45 tahun) pada tanggal 3 Agustus 2015 mengenai tujuan pembangunan pelabuhan palipi ini.

*“Tujuan dari pembangunan ini adalah salah satunya karena melihat adanya potensi bahari dan tentunya pelabuhan jika sukses maka akan menjadi pendokrak ekonomi diwilayah kecamatan Sendana khususnya warga desa sendana tentunya”*

Hal ini juga senada dengan pendapat dari kepala desa Sendana Pak Sudirman (43 Tahun).

*“Pembangunan ini diharapkan dapat menambah pendapatatan dari daerahprovinsi sulbar khususnya kabupaten majene dan tentunya masyarakat sekitar pembangunan ini. Kami berharap banyak pada pembangunan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa agar masyarakat lebih mudah meningkatkan pendapatan mereka khususnya nelayan.” (Wawancara 3 Agustus 2015)*

Dapat dilihat bahwa masyarakat pemerintah mempunyai misi terhadap pembangunan ini sebagai jalan intuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa sesuai pendapat oleh Seers memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan , ketidakseimbangan pendapatan dan pengangguranya,

Kemudian pemerintah kecamatan memberikan penjelasan tentang perannya dalam pembangunan pelabuhan ini,

*“ kami sebagai pemerintah kecamatan disini adalah tugasnya hanya sebagai pengawas dan memberikan izin dalam pembangunan ini karena program provinsi ya jadi kami hanya jadi pengawas dalam pembangunan ini dan tentunya kami mengharapakan agar masyarakat bisa tertib mengenai pembangunan ini kami bisa menjadi pemberi arahan ke mereka”(wawancara 3 Agustus 2015)*

Kepala desa sendana juga memberikan penjelasan,

*“Saya disini sebagai kepala desa tugasnya memberikan arahan kepada masyarakat dan menjadi pemberi solusi jika dalam masyarakat ada yang tidak disetujui seperti mengadakan musyawarah dengan penduduk desa apalagi terkait pembebasan lahan itu perlu di musyawarahkan dulu, dan tentunya mendampingi perusahaan dan pemerintah pusat dalam pembangunan ini” (Wawancara 3 Agustus 2015)*

Mengenai hambatan yang dihadapi pemerintah kecamatan dan Desa adalah sama-sama mengakui adanya masyarakat yang belum menerima relokasi seperti yang di sampaikan Pak Rusman (Sekcam)

*“Dalam pembangunan ini memang hambatan utamanya ada masyarakat yang tidak mau direlokasi mungkin karena harga tanahnya atau mungkin juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pembangunan ini Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan ini khususnya pemerintah pusat soal ada masyarakat yang belum menerima harga relokasi dan menolak untuk dipindahkan itu yang menjadi perhatian kami sebagai pemerintah Desa kan tugas kami sebagai kepala desa mengarahkan masyarakat” (Wawancara 1 September 2015)*

Dari pendapat pemerintah yang terkait dalam pembangunan ini dapat kita melihat pemerintah terus berupaya berunding dan memecahkan masalah yang dihadapi seperti melakukan musyawarah seperti yang dikatakan kepala desa jika mendapat permasalahan”

Dan menurut pemerintah jika masalah harga tanah sedang terus di diskusikan dengan masyarakat seperti yang dikatakan kepala desa berikut

*“kalo kita mau pembebasan lahan harus dulu melakukan negosiasi pada masyarakat dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu jadi tidak asal turun ke masyarakat tanpa melakukan negosiasi. saya sudah sering mendapatkan keluhan masyarakat tentang harga tanah karena masyarakat juga memasang harga, pemerintah pusat juga menetapkan harga tanah jadi susah, masyarakat pasang harga 350.000 per meter tapi pemerintah hanya 200.000 per meter. (1 September 2015)*

Harga tanah merupakan hal yang sangat fundamental disini karena kebanyakan dari masyarakat menolak direlokasi karena harga ganti rugi tanah akan mempengaruhi sendi perekonomian masyarakat yang terkenne relokasi seperti

keterangan beberapa masyarakat tadi yang mengeluh akan ganti rugi karena harga tanah sekarang memang tidak murah. Pernyataan dari kepala desa mengenai hal ini.

Kita juga tadi menyimak informan dari warga yang melihat dalam pembangunan ini adanya bangunan tanggul yang roboh seperti yang dikatakan Ibu Munawarah (25 Tahun)

*“ memang pernah ada tanggul yang roboh mungkin di karenakan kontruksinya yang kurang baik dan memang ini adalah salah dari pemerintah kenapa tanggul bisa roboh, saya juga heran kenapa tanggul yang roboh masyarakat yang disalahkan, kan disini ada pengawas yang pantau ini pembangunan jadi mereka yang seharusnya bertanggung jawab” (1 September 2015)*

Saya melakukan pertanyaan kepada pemerintah apakah pembangunan ini sudah tepat, berikut jawabannya dari Sekcam

*“Iya ini sudah tepat karena ini pembangunan pelabuhan yang besar pelabuhan nusantara jadi bisa mendokrak pendapatan daerah dan juga perekonomian sekecamatan dan masyarakat juga akan mudah mendapatkan ikan” (Wawancara 3 Agustus 2015)*

Kemudian menurut Kades Sendana

*“Ini program provinsi jadi ini adalah harapan provinsi sulbar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah khususnya di masyarakat nelayan di desa sendana dan juga masyarakat kabupaten majene karena kalau ini pembangunan sukses akan berdampak positif” (Wawancara 3 Agustus 2015)*

Dari permasalahan tentang alih fungsi lahan warga ini tentunya pemerintah mempunyai harapan agar masyarakatnya bisa bekerja sama agar pembangunan ini bisa berjalan karena tanpa adanya saling kerja sama pasti tidak akan mendapatkan jalan keluarnya seperti yang diharapkan oleh pak Kepala Desa Sendana, Berikut:

*“Kami selalu berusaha untuk memberikan pengarahan ke masyarakat tentang program pembangunan ini karena sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian, saya rasa masyarakat juga sadar, dan kalau masalah memberikan ganti rugi lahan, kita selalu memberikan yang layak karena kita tidak asal memberikan harga, kita juga melihat kondisi tanah yang ada, karena sebagian ada yang belum bersertifikat (wawancara 1 September 2015)*

Pendapat serupa juga dari Pak Sekcam mengatakan juga memberikan harapan agar pembangunan ini bisa bekerja sama antara pemerintah dan pemilik lahan pemukiman, berikut pernyataan Pak Sekcam:

*“Ini adalah program untuk masyarakat semuanya tertuju untuk kepentingan masyarakat tapi kita juga paham kalo masyarakat punya hak untuk mempertahankan lahan milik mereka, jadi kami akan selalu berkonsultasi dan melakukan sosialisasi mungkin secara adat pendekatannya agar lebih nyaman karena ini masyarakat desa mungkin pendekatan seperti itu akan lebih bersahabat” (Wawancara 1 September 2015)*

### **3. Mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat dalam pembangunan pelabuhan palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene**

Selama pembangunan pelabuhan palipi ini banyak ditemukan berbagai kendala baik dari masyarakat Desa Sendana dan Pemerintah seperti dana penggantian yang belum pas, pembangunan yang mandeg sampai pada kualitas gedung yang kurang baik. Pemerintah tentunya mempunyai pikiran yang sama dengan masyarakat yaitu ingin semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada yang dirugikan oleh karena itu yang dapat menyelesaikan masalah ini adalah pihak pihak yang terkait atau yang berhubungan dengan pembangunan Pelabuhan Sendana ini berikut solusi dari pemerintah terkait permasalahan yang dihadapi

Pak Sekcam

*“Untuk mengatasi hal ini tentunya kami sebagai pemerintah setempat harus terus melakukan komunikasi kepada masyarakat melakukan musyawarah tentang permasalahan yang dihadapi agar dalam pembangunan pelabuhan ini dapat berjalan dengan baik mulai dari pengucuran dana kita harus transparan ke masyarakat dan masyarakat juga harus bisa berpikir kedepan karena ini proyek pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang akan berpengaruh pada pendapatan daerah dan akan berpengaruh juga ke masyarakat” (Wawancara 1 September 2015)*

Kepala desa juga mempunyai solusi tentang hal ini,

*“ saya akan terus memantau pembangunan ini agar pemerintah pusat bisa segera menyelesaikan proyek ini dan saya akan berikan warga pemahaman tentang tujuan dari pembangunan ini manfaat yang di dapat oleh warga .*

*Kalau itu masalah dana penggantian lahan akan saya usahakan berbicara kepada pemerintah pusat soal keinginan warga yang ingin ganti ruginya sebanding kalau memang pemerintah menyanggupi Alhamdulillah kalau tidak ya kita harus kembali ke warga dengan meminta kesediaanya. Pembangunan ini harus cepat dilaksanakan supaya warga tahu dengan keseriusan pemerintah, saya sebagai kepala desa juga akan mengawasi pembangunan ini agar kejadian seperti tanggul jebol tidak terjadi lagi ini disebabkan oleh pengawas dari pembangunan ini dan material bangunannya juga tidak bagus” (Wawancara 1 September 2015)*

### **C. Pembahasan**

Pembangunan merupakan hal yang erat kaitannya dengan masyarakat karena pembangunan merupakan salah satu fenomena pertumbuhan yang terjadi dimasyarakat dan tak jarang pembangunan akan mengalami beberapa kendala,, seperti yang terjadi pada pembangunan pelabuhan palipi yang dimana terjadi beberapa kendala seperti:

#### **1. Pembebasan lahan**

Dalam proses pembebasan lahan masyarakat yang terkena pembangunan ini, ada beberapa masalah yang terjadi seperti dari beberapa kesaksian atau

informasi yang didapat dilapangan melalui wawancara yaitu mengenai dana ganti rugi lahan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena ganti rugi lahan mereka dianggap tidak sebanding dengan harga tanah mereka sehingga ini salah satu yang menyebabkan konflik dikalangan masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa untuk mencari lahan baru tentunya tidak murah dan pastinya membutuhkan dana yang lebih karena masyarakat tidak hanya mencari lahan baru tetapi juga akan terbebani oleh membangun rumah baru yang tentunya tidak membutuhkan dana yang lebih

## 2. Peran Pemerintah dalam pembangunan

Dalam pembangunan pelabuhan ini dianggap oleh sebagian masyarakat tidak becus dan tidak serius dalam membangun pelabuhan ini karena menurut masyarakat setempat pembangunan pelabuhan ini tidak terlihat dan sangat lambat karena pembangunan pelabuhan ini sudah lama digalakkan pemerintah namun sampai sekarang belum ada tanda tanda bahwa pelabuhan ini akan selesai sehingga inilah yang menjadikan masyarakat menjadi tidak pro dengan pemerintah karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum terlihat jelas bahkan pemerintah terkait hanya melakukan penimbunan-penimbunan tanah saja tanpa adanya pembanguana lanjutan

## 3. Tanggul Jebol

Dan salah satu yang menjadi masalah dalam pembangunan ini yaitu tanggul yang sering jebol, dari kesaksian warga setempat mengatakan bahwa tanggul pelabuhan sering mengalami jebol atau runtuh walaupun umur tanggul tersebut belum lama dibuat tetapi sering jebol ini disebabkan karena kualitas

tanggul yang dibuat tidak bagus, tanggul yang dibuat tidak kuat menahan arus ombak sehingga sering jebol dan hanya itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanya memperbaiki tanggul yang roboh.

Pembangunan seharusnya dilakukan secara serius oleh pemerintah karena pembangunan merupakan proses yang perlu ada di masyarakat karena dapat mendorong perekonomian masyarakat seperti pelabuhan palipi ini dapat mendorong perekonomian masyarakat sebab masyarakat sekitar dapat dengan lebih mudah mengolah hasil tangkapan ikan mereka karena mayoritas penduduk sekitar bekerja sebagai nelayan.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berlangsung pada level makro dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*). Pertumbuhan dan diversifikasi.

Jadi pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bersifat positif namun tidak semua pembangunan itu membawa perubahan yang bersifat positif kadang dalam pembangunan juga memberikan dampak negatif karena adanya ketidaksesuaian harapan masyarakat apalagi kalau pembangunan itu menyangkut masalah vital bagi masyarakat contohnya saja pada kasus di atas pengalihan fungsi

lahan di atas yang berakibat dipindahkannya tempat tinggal masyarakat otomatis akan menjadikan masyarakat tidak nyaman dan yang membuat parahnya lagi keadaan diatas adalah dari pihak pemerintah sendiri yang masih belum bias memberikan kepuasan terhadap masyarakat karena bebrbagai factor mulai dari pembelian lahan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sampai pada pembangunan yang mandeq.

Inilah salah satu yang menyebabkan adanya konflik yang terjadi di masyarakat karena adanya kepentingan yang berbeda maka terjadilah yang namanya konflik di masyarakat, namun konflik itu bisa bersifat positif jika dapat di kontrol.

Berikut beberapa penyebab konflik Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli.

a. Teori jonathan turner(2007: 81-82)

Jonathan Turner menguraikan proses terjadinya konflik terdiri atas Sembilan tahap, yaitu :

- 1 Sistem sosial tersusun atas sejumlah unit yang saling tergantung satu sama lain.
- 2 Ada ketidaksamaan distribusi mengenai sumber-sumber langka yang bernilai di antara unit-unit tersebut.
- 3 Unit-unit yang menerima pembagian sumber-sumber secara tidak proporsional mulai mempersoalkan legitimasi dari sistem sosial yang ada.
- 4 Masyarakat yang tidak mempunyai mulai menyadari bahwa ada kepentingan bagi mereka untuk mengubah sistem lokasi sumber-sumber yang ada.
- 5 Mereka yang tidak mempunyai mulai menjadi emosional.
- 6 Secara berkala muncul ledakan frustrasi, seringkali tidak terorganisasi.

- 7 Intensitas keterlibatan mereka dalam konflik semakin meningkat dan keterlibatan tersebut semakin emosional.
- 8 Berbagai upaya dibuat untuk mengorganisasikan keterlibatan kelompok tak berpunya dalam konflik tersebut.
- 9 Akhirnya, konflik terbuka dalam berbagai tingkat kekerasan terjadi diantara mereka yang tidak berpunya dan mereka yang berpunya.

Konflik juga terjadi dalam kasus Pembangunan Pelabuhan Palipi ini karena adanya kepentingan yang berbeda dan pihak yang berkuasalah yang akan memberikan tekanan ke masyarakat, seperti pendapat dari Ralf Dahrendorf. Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (*domination*) dan yang dikuasai (*submission*), maka jelas ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan.

Jadi sudah jelas bahwa konflik itu terjadi karena adanya suatu kepentingan dari kedua pihak yang berbeda seperti halnya kasus Pembangunan Pelabuhan Palipi ini dimana pemerintah mempunyai otoritas atau kewenangan dalam membangun pelabuhan ini sehingga kewenangan itu digunakan untuk membangun dan menertipkan lahan tempat tinggal masyarakat dan respon pun masyarakat ada yang tidak sepuas dengan pemerintah maka inilah yang menyebabkan konflik. Salah Factor yang menyebabkan konflik adanya pembebasan lahan yang tidak sesuai harapan pemerintah khususnya dalam hal ganti rugi lahan. Ini semua disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan masyarakat yang otomatis akan merubah hidup masyarakat baik mungkin dari segi ekonomi maupun dari segi sosialnya, berikut ini yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan :

- a. Faktor Kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, seperti, perekonomian masyarakat, jalan transportasi, tempat rekreasi, dan sarana lainnya.
- b. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan pelabuhan, areal estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pemukiman warga. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasinya dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya (sub urban area). Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran pengembangan kegiatan non pertanian mengingat harganya yang relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya.
- c. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
- d. Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional yang sebenarnya penting bagi masyarakat secara keseluruhan.
- e. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari peraturan-peraturan yang ada.

Maka dalam penyelesaian masalah ini harus melalui adanya saling mengerti dari pihak pemerintah dan masyarakat, karena pembangunan ini dapat menunjang perekonomian masyarakat Sulawesi Barat terlebih masyarakat setempat karena dengan adanya Pelabuhan ini tentunya akan menambah atau meningkatkan status perekonomian masyarakat sekitar, karena akan menyerap tenaga kerja dan menambah pemasukan APBD ini tentunya akan menguntungkan banyak pihak, dan Pembangunan Palipi ini sangat baik karena akan memudahkan masyarakat yang mayoritas nelayan dalam meningkatkan pendapatannya, dan juga dari pihak pemerintah haruslah memperhatikan aspek-aspek yang penting dari masyarakat

jika terjadi pembangunan contoh halnya penggantian lahan haruslah pemerintah dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pembelian lahannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. Konflik yang terjadi dalam pembangunan pelabuhan ini disebabkan oleh adanya ketidak sepakatan antara pemerintah dengan masyarakat desa sendana yang dimana masyarakat menginginkan alih fungsi lahan atau lahan tempat tinggal mereka dapat diganti sesuai keinginan mereka. Alasan masyarakat melakukan ini karena harga yang ditawarkan pemerintah masih terlalu rendah untuk mengganti lahan mereka sehingga akan sulit mendapatkan lahan baru jika masyarakat menerimanya, belum lagi soal perbaikan rumah dan kinerja pemerintah dalam pembangunan ini belum maksimal karena pembangunan pelabuhan ini sudah sangat lama namun belum rampung sampai saat ini dan masalah yang lain adalah tentang bangunan yang ada kualitasnya tidak terlalu bagus sehingga masyarakat menjadi ragu akan kinerja pemerintah itu sendiri.

Konflik tanah ini juga bisa disebabkan oleh anggapan masyarakat kepada pemerintah bahwa pembangunan ini tidak serius karena masyarakat melihat adanya bangunan yang sudah rubuh padahal umur bangunan itu belum tua karena setiap tahun hanya tanggul-tanggul yang rubuh saja yang diperbaiki

2. Dapat memahami bahwa pemerintah mempunyai peranan dalam proses pembangunan ini selain berperan sebagai penyalur dana pembangunan pelabuhan ini, pemerintah juga mempunyai peranan sebagai agen yang memberikan pengarahannya tentang pembangunan pelabuhan palipi kepada masyarakat dan memberikan jalan keluar atau memberikan solusi bila dalam proses pengalihan fungsi tanah masyarakat terjadi kendala karena dalam proses pembangunan ini lebih banyak terjadi kendala dalam hal pembebasan lahan masyarakat
3. Mengetahui cara pemerintah menyelesaikan persoalan di masyarakat terkait pembangunan ini contohnya ganti rugi lahan masyarakat dengan cara melakukan negosiasi atau musyawarah secara kekeluargaan sampai kesepakatan didapatkan tentunya yang menjadi pemeran utama dalam penyelesaian masalah ini adalah pemerintah itu sendiri dan pemerintah desa juga mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat mengenai pembebasan lahan akan selesai karena masyarakat juga sendiri akan sadar bahwa pembangunan pelabuhan ini baik dan akan membantu masyarakat dalam proses peningkatan perekonomian masyarakat.

## **B. Saran**

Pembangunan pelabuhan Palipi ini adalah aset yang sangat penting khususnya untuk provinsi sulbar karena ini akan menjadikan Sulawesi barat sebagai salah satu sentra penghasil ikan disamping itu pembangunan ini juga akan ikut mensejahterakan masyarakat karena akan menampung tenaga kerja, dan otomatis tingkat perekonomian masyarakat akan berubah ini adalah sesuatu yang

sangat positif bagi masyarakat karena ini adalah pendokrak dari pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Sebagai mahasiswa saya turut berharap agar pembangunan ini dapat di dukung oleh semua elemen masyarakat sebab ini adalah awal atau jalan menuju masyarakat yang mandiri, ini adalah salah satu cara agar kecamatan sendana ini dapat dikenal oleh orang-orang luar, saya mempunyai saran agar masyarakat setempat mau ikut dalam pembangunan ini caranya dengan mengikuti kesempatan pemerintah dan memberikan masukan ke pihak pemerintah jika ada yang tidak sesuai.

Berbicara tentang masalah ganti rugi lahan yang tidak sesuai itu bisa pemerintah tutupi dengan menjadikan masyarakat kecamatan sendana khususnya desa sendana sebagai tuan rumah dan menyerap tenaga tenaga kerja dari warga desa sendana dan pemerintah juga harus benar-benar serius dalam pembangunan ini sebab pembangunan ini masih belum terlihat oleh masyarakat itulah salah satu yang menyebabkan masyarakat masih belum percaya, pemerintah harus segera merampungkan pembangunan ini agar masyarakat dapat menikmatinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- D. Soetrisno, S.H. *Petunjuk Praktis Tata Cara Perolehan Tanah untuk Industri*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, 2008 Kencana Prenada Media Group.
- Johnson, Doyle P diterj. Robert M.Z.Lawang, *Teori Sosiologi Klasik Modern*, Jakarta 1990.Gramedia Pustaka Utama.
- Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filsof Terkemuka*. Yogyakarta, 2003. Pustaka Belajar.
- Ir Aji Suraji MSc. *Prasarana Transportasi Pelabuhan*. Universitas Widyagama Malang.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial*, terj, Hadiman. Yogyakarta, 1994. Kanisius
- Craib, Ian. *Parsons Sampai Habermas, Teori Sosial Modern*, Jakarta,1994. PT Raja Grafindo Persada
- Doyle Paul Johnson terj. Robert Lawang. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern jilid 1 & 2*. Jakarta. 1986. PT Gramedia
- Prof.Dr.Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, 2012. Prenada Media Group
- Soerjono Soekanto.*Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*.Jakarta.2011.PT.Raja Grafindo
- Yad Mulyadi dkk. *Sosiologi SMA Kelas XI 2*.Jakarta.2013.Yudhistira
- H.Rochajat Harun, Ir, M.Ed, Ph.D. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta, 2011. Rajawali Pers
- Joseph S, Nye. Jr *Memimpin Dunia Sifat Kekuatan Amerika yang Berubah*. Jakarta.1992 Yayasan Obor Indonesia.
- John Scott. *Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Prof. Dr.Miftanah Thoha, MPA. *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta
- Bernard Raho, SVD.*Teori Sosiologi Modern*.Prestasi Pustaka
- Prof. Dr.Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si. (2009). *Teori dan Indikator Pembangunan*.

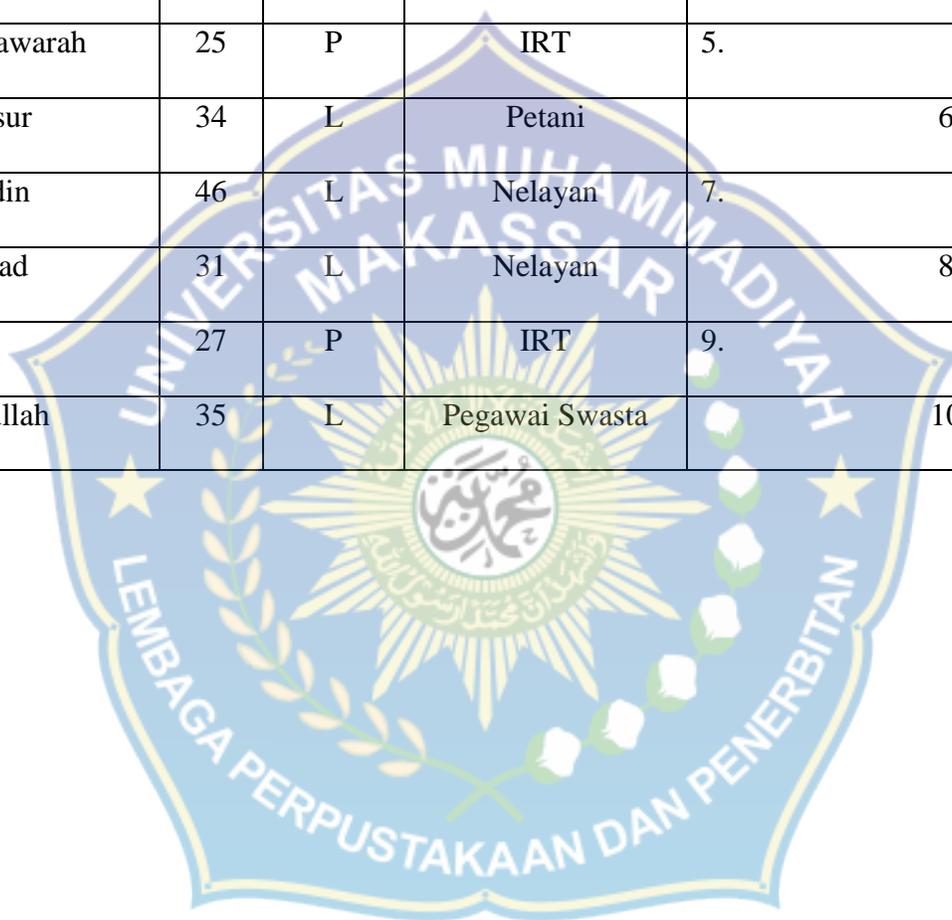
Tersedia:<http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> . 10 Mei 2015

<http://supardinatajoni.blogspot.com/2011/03/sosiologi-sebagai-ilmu-dan-metode.html>. 22 Februari 2012. diakses pada tanggal 10 Mei 2015

Jay Liem. Pengertian Masyarakat dan pemahamannya secara mendalam.  
<http://9wiki.net/pengertian-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 18 april 2015



No.	Nama Responden	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Tanda Tangan
1.	Ani	35	P	IRT	1.
2.	Aco	37	L	Perkerja Serabutan	2.
3.	Basri	47	L	PNS	3.
4.	Wiranti	35	P	IRT	4.
5.	Munawarah	25	P	IRT	5.
6.	Mansur	34	L	Petani	6.
7.	Kundin	46	L	Nelayan	7.
8.	Ahmad	31	L	Nelayan	8.
9	Iis	27	P	IRT	9.
10	Saifullah	35	L	Pegawai Swasta	10.



**KONFLIK ALIH FUNGSI TANAH PADA MASYARAKAT**  
**(STUDI KASUS PEMBANGUNAN PELABUHAN PALIPI**  
**KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE)**

**Muh Mawardi**

**105380212411**

Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Makassar

**Abstrak**

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian sosial budaya yang Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *Wawancara langsung* dengan memilih beberapa informan yang memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, yakni orang asli Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dan mengetahui penyebab konflik di masyarakat dalam pembangunan pelabuhan palipi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Konflik alih fungsi tanah pada masyarakat dan penyebab dari konflik* itu sendiri dan mengetahui cara mengatasi konflik itu sendiri. Karena konflik dapat menyebabkan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya konflik yang terjadi di masyarakat dalam pembangunan ini salah satu penyebabnya adalah adanya ketiidak sesuaian harapan masyarakat terkhusus dalam hal alih fungsi lahan mulai dari penolakan untuk di relokasi, ganti rugi yang tidak sebanding dan adanya kinerja pembangunan yang tidak terlalu bagus dari pemerintah karena masyarakat juga perlu melihat keseriusan dari pemerintah. Hal ini dapat kita jumpai khususnya di Desa Sendana yang dimana masyarakatnya menjadi tidak nyaman atau dengan kata lain masih kurang menerima adanya pembangunan pelabuhan Palipi ini. Dan peran serta masyarakat dan pemerintahlah yang dapat menyelesaikan masalah ini karena ini merupakan kebutuhan bersama dan

memeiliki tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan daerah itu sendiri

### **Kata Kunci: Konflik, Alih fungsi lahan**

#### **Latar Belakang**

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan pendukung mata pencaharian di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industry, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan yang mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Banyaknya manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak bertambahnya jumlah tanah yang ada menjadi salah satu inti permasalahannya. Lahan sebagai bagian atau unsur dari lingkungan alam adalah merupakan salah satu wadah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatannya. Sejalan dengan diungkapkan Bintarto (1977:10) lahan diartikan sebagai "suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dimana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupannya". Lahan merupakan potensi fisik atau sumber daya alam yang secara kuantitas tidak akan bertambah, sedangkan pertumbuhan penduduk senantiasa mengalami perkembangan cukup pesat dari waktu ke waktu. Hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan penduduk akan lahan yang tidak terbatas dengan jumlah lahan yang terbatas. Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya penduduk dan meningkatnya pembangunan, maka semakin meningkat pula kebutuhan penggunaan lahan

Menurut Arsyad (1989:207) penggunaan lahan (land use) diartikan sebagai "bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spirituil". Sedangkan pengertian penggunaan lahan yang dikemukakan oleh Vink dalam Sitorus (1986:176) yaitu setiap bentuk campur tangan manusia terhadap sumber daya

lahan baik yang sifatnya tetap atau permanen ataupun merupakan daur yang bertujuan memenuhi kebutuhan material maupun spiritual ataupun keduanya.

Mau tidak mau untuk menjalankan pembangunan, diadakan proses pengadaan tanah yang asalnya dari tanah yang sudah dihaki oleh rakyat. Proses tersebut cukup memakan waktu yang lama, oleh karena salah satu pihak merasa adanya ketidak-adilan. Proses yang cukup lama ini, otomatis membuat jalannya pembangunan menjadi tersendat.

Banyaknya manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak bertambahnya jumlah tanah yang ada menjadi salah satu inti permasalahannya. Mau tidak mau untuk menjalankan pembangunan, diadakan proses pengadaan tanah yang asalnya dari tanah yang sudah dihaki oleh rakyat.

Sama halnya dalam kasus pembangunan pelabuhan palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene yang menimbulkan konflik karena tanah yang digunakan dalam proses pembangunan adalah tanah masyarakat sehingga menimbulkan respon negative oleh masyarakat.

Pembangunan pelabuhan palipi ini banyak menuai kendala karena berbagai permasalahan mulai dari ketidak setujuan masyarakat direlokasi, pengambilan lahan pertanian walaupun dalam jumlah kecil, hingga pembayaran ganti rugi lahan yang belum tuntas, walaupun sebagian masyarakat ada yang sudah menerima proses relokasi tetapi konflik yang terjadi dalam masyarakat tetap saja terjadi.

### **Kajian Pustaka**

Pengertian masyarakat menurut para ahli

Menurut Howard S. becker (1928:25) masyarakat adalah sebuah hubungan dan mengenai bagaimana kita saling berhubungan satu sama lain; bagaimana kita hidup dengan dengan orang lain dan bagaimana kita hidup tanpa orang alin.. George simmel (2011; 25) yg melihat masyarakat sebagai hubungan dan interaksi yang sudah tertanam ia menyatakan bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang benar-benar nyata

Berbeda dengan pendapat Emile Durkheim (2011:25) baginya baginya masyarakat berdiri dengan dengan cara yg khas sebagai suatu kenyataan kolektif atas individu-individu yang berada di dalamnya.

Pengertian masyarakat menurut **model (R.S.Park dan E.W. Burgess 2011:493)**

adalah suatu konfigurasi atau sistem yang dipertahankan harmoninya oleh hakikat resiprokal interaksi sosial. (Talcot Parsons 2011:493) Masyarakat merupakan sistem yang dipertahankan oleh pola tertentu yang sama dengan suatu organisme

Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Soerjono Soekanto (2013:84) menyatakan bahwa konflik sebagai proses sosial, dimana orang perorang, atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawannya, disertai ancaman atau kekerasan.

a. Teori jonathan turner(2007: 81-82)

Jonathan Turner menguraikan proses terjadinya konflik terdiri atas Sembilan tahap, yaitu :

- 1 Sistem sosial tersusun atas sejumlah unit yang saling tergantung satu sama lain.
- 2 Ada ketidaksamaan distribusi mengenai sumber-sumber langka yang bernilai di antara unit-unit tersebut.
- 3 Unit-unit yang menerima pembagian sumber-sumber secara tidak proporsional mulai mempersoalkan legitimasi dari sistem sosial yang ada.
- 4 Masyarakat yang tidak berupaya mulai menyadari bahwa ada kepentingan bagi mereka untuk mengubah sistem lokasi sumber-sumber yang ada.
- 5 Mereka yang tidak berpunyai mulai menjadi emosional.
- 6 Secara berkala muncul ledakan frustrasi, seringkali tidak terorganisasi.
- 7 Intensitas keterlibatan mereka dalam konflik semakin meningkat dan keterlibatan tersebut semakin emosional.
- 8 Berbagai upaya dibuat untuk mengorganisasikan keterlibatan kelompok tak berpunya dalam konflik tersebut.

- 9 Akhirnya, konflik terbuka dalam berbagai tingkat kekerasan terjadi diantara mereka yang tidak mempunya dan mereka yang mempunya.

b. Teori Lewis Coser (2008: 159)

Menurut teori Coser konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Ia menekankan pentingnya konflik untuk mempertahankan keutuhan kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Konflik Menurut Ralf Dahrendorf (2007:77-80)

**Teori konflik Ralf Dahrendorf** muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori Konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.

Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural dan akibat berbagai kritik, yang berasal dari sumber lain seperti teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel

Alih fungsi lahan merupakan pengalihan suatu guna lahan satu ke guna lahan yang lain, atau berubahnya fungsi lahan yang biasa digunakan ke kegunaan yang sebelumnya belum pernah digunakan.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan antara lain:

- a. Faktor Kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, seperti, perekonomian masyarakat, jalan transportasi, tempat rekreasi, dan sarana lainnya.
- b. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan pelabuhan, areal estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-

jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pemukiman warga. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasinya dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya (sub urban area). Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran pengembangan kegiatan non pertanian mengingat harganya yang relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya.

- c. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
- d. Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional yang sebenarnya penting bagi masyarakat secara keseluruhan.
- e. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari peraturan-peraturan yang ada.

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku atau **Robert Dahl (1992:55)** politikus terkemuka ini mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu yg dengan cara lain tidak akan dilakukannya

Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. **Macht (1992:55)** mengatakan bahwa kekuasaan adalah dimana seseorang memaksakan kehendaknya terhadap orang atau pihak lain. Kekuasaan

biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan.

Menurut (Robert Bierstedt 2011:429) fokus kekuasaan adalah berasal dari kelompok yaitu:

- |                   |    |
|-------------------|----|
| Sejumlah Manusia  | 1. |
| Organisasi Sosial | 2. |
| Sumber Daya       | 3. |

Beberapa sumber daya yang dapat mengembangkan atau memperkuat posisi kekuasaan, yakni:

1. Kekuasaan Militer, Polisi atau kriminal untuk mengendalikan kekerasan
2. Kekuasaan ekonomi untuk mengendalikan tanah, tenaga kerja, kekayaan maupun produksi
3. Kekuasaan Politik untuk mengendalikan pengambilan keputusan yang sah atau resmi
4. Kekuasaan tradisional atau ideologis untuk mengendalikan sistem kepercayaan dan nilai-nilai, agama, pendidikan, pengetahuan khusus, dan propaganda.
5. Kekuasaan diversioner untuk mengendalikan kepentingan hedonis, rekreasi dan pemenuhan kebutuhan sekunder.

a. Kekuasaan bersifat Negatif

Merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam memengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental. Biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik, mereka hanya berfikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam dalam mengambil suatu tindakan, bahkan mereka sendiri kadang-kadang tidak dapat menjalankan segala perintah yang mereka perintahkan kepada orang atau kelompok yang berada di bawah kekuasannya karena keterbatasan daya pikir tadi. dan biasanya kekuasaan dengan karakter negatif tersebut hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu. karena mereka tidak memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk

menghasilkan apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersebut biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya.

Di negara demokrasi, dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Partai partai politik berusaha untuk merebut konstituen dalam masa pemilu. Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung seperti yang terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2004 maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

#### Sifatkekuasaan

Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering kita dengar, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Power tends to corrupt*. Kekuasaan dapat dikatakan melekat pada jabatan ataupun pada diri orang tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Position Power, kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi.
2. Personal Power, kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya.

#### c. Kekuasaan Politik

Menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani *Politeia* (berarti kiat memimpin kota (*polis*)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita (untuk saat itu) maka kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka..Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka

mempunyai kekuasaan politik.

Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (*authority*), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi. Sedangkan kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional.

#### d. Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk social memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu factor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Pengertian pembangunan, para ahli memberikan defenisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah satu dengan daerah lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Walt Rostow (2011: 99-100) Menguraikan secara rinci teori pertumbuhan ekonomi, di dalam langkah-langkah pertumbuhan ekonominya. Keutamaannya ia membangun suatu lima bentuk model transisi dari suatu ekonomi tradisional pada suatu kompleks industri modern ia menyatakan bentuk tersebut adalah masyarakat tradisional, prasyarat untuk

keberangkatan, keberangkatan, pengarah ke kedewasaan dan umur konsumsi yang tinggi. Ia percaya bahwa tiap-tiap masyarakat akan menerobos lima langkah-langkah pertumbuhan ekonomi memimpin akhirnya sampai akhir tahap usia konsumsi tinggi

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi pada daerah tertentu. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan interviewer atau moderator group periset menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam grup. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari interviewer atau moderator group

### **Pembahasan**

Pembangunan merupakan hal yang erat kaitannya dengan masyarakat karena pembangunan merupakan salah satu fenomena pertumbuhan yang terjadi dimasyarakat dan tak jarang pembangunan akan mengalami beberapa kendala,, seperti yang terjadi pada pembangunan pelabuhan palipi yang dimana terjadi beberapa kendala seperti:

#### **1. Pembebasan lahan**

Dalam proses pembebasan lahan masyarakat yang terkena pembangunan ini, ada beberapa masalah yang terjadi seperti dari beberapa kesaksian atau informasi yang didapat dilapangan melalui wawancara yaitu mengenai dana ganti

rugi lahan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena ganti rugi lahan mereka dianggap tidak sebanding dengan harga tanah mereka sehingga ini salah satu yang menyebabkan konflik dikalangan masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa untuk mencari lahan baru tentunya tidak murah dan pastinya membutuhkan dana yang lebih karena masyarakat tidak hanya mencari lahan baru tetapi juga akan terbebani oleh membangun rumah baru yang tentunya tidak membutuhkan dana yang lebih

## 2. Peran Pemerintah dalam pembangunan

Dalam pembangunan pelabuhan ini dianggap oleh sebagian masyarakat tidak becus dan tidak serius dalam membangun pelabuhan ini karena menurut masyarakat setempat pembangunan pelabuhan ini tidak terlihat dan sangat lambat karena pembangunan pelabuhan ini sudah lama digalakkan pemerintah namun sampai sekarang belum ada tanda tanda bahwa pelabuhan ini akan selesai sehingga inilah yang menjadikan masyarakat menjadi tidak pro dengan pemerintah karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum terlihat jelas bahkan pemerintah terkait hanya melakukan penimbunan-penimbunan tanah saja tanpa adanya pembanguana lanjutan

## 3. Tanggul Jebol

Dan salah satu yang menjadi masalah dalam pembangunan ini yaitu tanggul yang sering jebol, dari kesaksian warga setempat mengatakan bahwa tanggul pelabuhan sering mengalami jebol atau runtuh walaupun umur tanggul tersebut belum lama dibuat tetapi sering jebol ini disebabkan karena kualitas tanggul yang dibuat tidak bagus, tanggul yang dibuat tidak kuat menahan arus ombak sehingga sering jebol dan hanya itu yang bis dilakukan oleh pemerintah hanya memperbaiki tanggul yang roboh.

Pembangunan seharusnya dilakukan secara serius oleh pemerintah karena pembangunan merupakan proses yang perlu ada di masyarakat karena dapat mendokrak perekonomian masyarakat seperti pelabuhan palipi ini dapat mendokrak perekonomian masyarakat sebab masyarakat sekitar dapat dengan lebih mudah mengolah hasil tangkapan ikan mereka karena mayoritas penduduk sekitar bekerja sebagai nelayan

Maka dalam penyelesaian masalah ini harus melalui adanya saling mengerti dari pihak pemerintah dan masyarakat, karena pembangunan ini dapat menunjang perekonomian masyarakat Sulawesi Barat terlebih masyarakat setempat karena dengan adanya Pelabuhan ini tentunya akan menambah atau meningkatkan status perekonomian masyarakat sekitar, karena akan menyerap tenaga kerja dan menambah pemasukan APBD ini tentunya akan menguntungkan banyak pihak, dan Pembangunan Palipi ini sangat baik karena akan memudahkan masyarakat yang mayoritas nelayan dalam meningkatkan pendapatannya, dan juga dari pihak pemerintah haruslah memperhatikan aspek-aspek yang penting dari masyarakat jika terjadi pembangunan contoh halnya penggantian lahan haruslah pemerintah dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pembelian lahannya.

### **Kesimpulan**

1. Konflik yang terjadi dalam pembangunan pelabuhan ini disebabkan oleh adanya ketidaksepakatan antara pemerintah dengan masyarakat desa sendana yang dimana masyarakat menginginkan alih fungsi lahan atau lahan tempat tinggal mereka dapat diganti sesuai keinginan mereka. Alasan masyarakat melakukan ini karena harga yang ditawarkan pemerintah masih terlalu rendah untuk mengganti lahan mereka sehingga akan sulit mendapatkan lahan baru jika masyarakat menerimanya, belum lagi soal perbaikan rumah dan kinerja pemerintah dalam pembangunan ini belum maksimal karena pembangunan pelabuhan ini sudah sangat lama namun belum rampung sampai saat ini dan masalah yang lain adalah tentang bangunan yang ada kualitasnya tidak terlalu bagus sehingga masyarakat menjadi ragu akan kinerja pemerintah itu sendiri. Konflik tanah ini juga bisa disebabkan oleh anggapan masyarakat kepada pemerintah bahwa pembangunan ini tidak serius karena masyarakat melihat adanya bangunan yang sudah rubuh padahal umur bangunan itu belum tua karena setiap tahun hanya tanggul-tanggul yang rubuh saja yang diperbaiki
2. Dapat memahami bahwa pemerintah mempunyai peranan dalam proses pembangunan ini selain berperan sebagai penyalur dana pembangunan pelabuhan ini, pemerintah juga mempunyai peranan sebagai agen yang

memberikan pengarahannya tentang pembangunan pelabuhan palipi kepada masyarakat dan memberikan jalan keluar atau memberikan solusi bila dalam proses pengalihan fungsi tanah masyarakat terjadi kendala karena dalam proses pembangunan ini lebih banyak terjadi kendala dalam hal pembebasan lahan masyarakat

3. Mengetahui cara pemerintah menyelesaikan persoalan di masyarakat terkait pembangunan ini contohnya ganti rugi lahan masyarakat dengan cara melakukan negosiasi atau musyawarah secara kekeluargaan sampai kesepakatan didapatkan tentunya yang menjadi pemeran utama dalam penyelesaian masalah ini adalah pemerintah itu sendiri dan pemerintah desa juga mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat mengenai pembebasan lahan akan selesai karena masyarakat juga sendiri akan sadar bahwa pembangunan pelabuhan ini baik dan akan membantu masyarakat dalam proses peningkatan perekonomian masyarakat.

#### **Saran**

Pembangunan pelabuhan Palipi ini adalah aset yang sangat penting khususnya untuk provinsi sulbar karena ini akan menjadikan Sulawesi barat sebagai salah satu sentra penghasil ikan disamping itu pembangunan ini juga akan ikut mensejahterakan masyarakat karena akan menampung tenaga kerja, dan otomatis tingkat perekonomian masyarakat akan berubah ini adalah sesuatu yang sangat positif bagi masyarakat karena ini adalah pendokrak dari pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Sebagai mahasiswa saya turut berharap agar pembangunan ini dapat didukung oleh semua elemen masyarakat sebab ini adalah awal atau jalan menuju masyarakat yang mandiri, ini adalah salah satu cara agar kecamatan sendana ini dapat dikenal oleh orang-orang luar, saya mempunyai saran agar masyarakat setempat mau ikut dalam pembangunan ini caranya dengan mengikuti kesempatan pemerintah dan memberikan masukan ke pihak pemerintah jika ada yang tidak sesuai.

Berbicara tentang masalah ganti rugi lahan yang tidak sesuai itu bisa pemerintah tutupi dengan menjadikan masyarakat kecamatan sendana khususnya desa sendana sebagai tuan rumah dan menyerap tenaga tenaga kerja dari warga

desa sendana dan pemerintah juga harus benar-benar serius dalam pembangunan ini sebab pembangunan ini masih belum terlihat oleh masyarakat itulah salah satu yang menyebabkan masyarakat masih belum percaya, pemerintah harus segera merampungkan pembangunan ini agar masyarakat dapat menikmatinya.

### **Daftar Pustaka**

D. Soetrisno, S.H. *Petunjuk Praktis Tata Cara Perolehan Tanah untuk Industri*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Ritzer, George & Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, 2008  
Kencana Prenada Media Group.

Johnson, Doyle P diterj. Robert M.Z.Lawang, *Teori Sosiologi Klasik Modern*, Jakarta 1990.Gramedia Pustaka Utama.

Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta, 2003. Pustaka Belajar.

Ir Aji Suraji MSc. *Prasarana Transportasi Pelabuhan*. Universitas Widyagama Malang.

Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial*, terj, Hadiman. Yogyakarta, 1994. Kanisius

Craib, Ian. *Parsons Sampai Habermas, Teori Sosial Modern*, Jakarta,1994. PT Raja Grafindo Persada

Doyle Paul Johnson terj. Robert Lawang. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern jilid 1 & 2*. Jakarta. 1986. PT Gramedia

Prof.Dr.Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, 2012. Prenada Media Group

Soerjono Soekanto.*Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*.Jakarta.2011.PT.Raja Grafindo

Yad Mulyadi dkk. *Sosiologi SMA Kelas XI 2*.Jakarta.2013.Yudhistira

H.Rochajat Harun, Ir, M.Ed, Ph.D. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta, 2011. Rajawali Pers

Joseph S, Nye. Jr Memimpin Dunia Sifat Kekuatan Amerika yang Berubah. Jakarta.1992  
Yayasan Obor Indonesia.

John Scott. Teori Sosial: *Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*. Jakarta.  
Pustaka Pelajar

Prof. Dr.Miftanah Thoha, MPA. Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan. Jakarta

Bernard Raho, SVD. Teori Sosiologi Modern. Prestasi Pustaka

Prof. Dr.Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si. (2009). Teori dan Indikator  
Pembangunan.

Tersedia:<http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> . 10 Mei 2015

<http://supardinatajoni.blogspot.com/2011/03/sosiologi-sebagai-ilmu-dan-metode.html>. 22 Februari 2012. diakses pada tanggal 10 Mei 2015

Jay Liem. Pengertian Masyarakat dan pemahamannya secara mendalam.

<http://9wiki.net/pengertian-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 18 april 2015